

TAHUN 2023



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT JENDERAL  
KEBUDAYAAN





# KATA PENGANTAR

i

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2023.

Jakarta, 30 Januari 2024  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan



Fitra Arda



# DAFTAR ISI

- i Kata Pengantar
- ii Daftar Isi
- iii Ikhtisar Eksekutif
- v Permasalahan Umum & Langkah Antisipasi

## BAB I. PENDAHULUAN

- Gambaran Umum 01
- Dasar Hukum 02
- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 02
- Isu dan Peran Strategis 04

01.

05.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 05 Visi, Misi, dan Tujuan
- 06 Rencana Kinerja Jangka Menengah
- 07 Perjanjian Kinerja Awal
- 09 Perjanjian Kinerja Akhir
- 10 Program Prioritas

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja 12
- Realisasi Anggaran 40
- Efisiensi Anggaran 42
- Inovasi 42
- Penghargaan 42
- Program Crosscutting 43

12.

46.

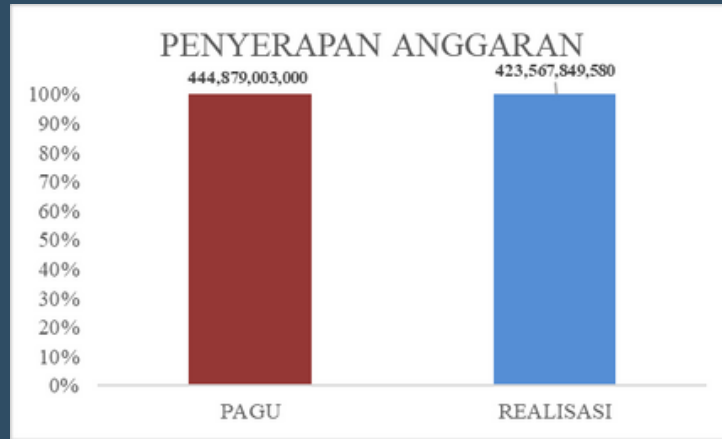
## BAB IV. PENUTUP

- 46 Ringkasan Kinerja
- 47 Langkah Kerja ke Depan

## LAMPIRAN

48.

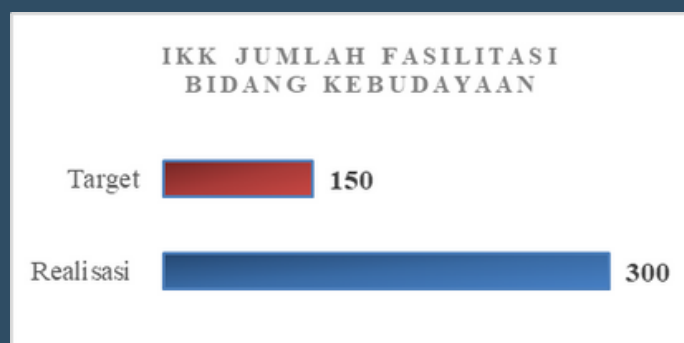
Laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.



SK Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan



SK Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola





## SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

IKK PERSENTASE SATKER DI DITJEN  
KEBUDAYAAN YANG MEMILIKI  
PREDIKAT SAKIP MINIMAL BB

Target  70%

Realisasi  100%

IKK JUMLAH SATKER DI  
DITJEN KEBUDAYAAN YANG  
DIUSULKAN MENDAPATKAN  
PREDIKAT ZI-WBK/WBBM

Target  1

Realisasi — 0

**Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :**

1. Kegiatan "Festival Indonesia" di Doha dibatalkan sesuai dengan keputusan bersama oleh Qatar dan Indonesia dikarenakan rasa solidaritas pada masyarakat Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Pembatalan ini berdampak pada beberapa hal teknis dan administratif yang sebetulnya telah disiapkan sejak jauh-jauh hari.terkait hal ini, dampak yang sangat signifikan sisa anggaran pada kegiatan festival Qatar yang tidak terserap secara maksimal. Kegiatan yang dilakukan oleh Setditjen Kebudayaan bekerjasama dengan National Museum of Qatar pada bulan November tahun 2023 yaitu kegiatan pameran kopi dan mengirimkan kurator serta barista kopi untuk memperkenalkan aroma kopi yang ada di wilayah Indonesia;
2. Banyak linimasa penerima Fasilitas Bidang Kebudayaan yang kegiatannya terlalu mepet sebelum pencairan dan masih kurang pemahamannya Para Penerima dana Fasilitas Bidang Kebudayaan tentang Perpajakan.dengan permasalahan ini target capaian kinerja kegiatan fasilitas bidang kebudayaan tetap tercapai; dan
3. Perubahan restrukturisasi organisasi di Ditjen Kebudayaan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya yang digabungkan menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan dan penggabungan seluruh museum menjadi UPT Museum dan Cagar Budaya sehingga untuk mengusulkan dan menetapkan satker Ditjen Kebudayaan menjadi ZI-WBK tidak dapat terlaksa pada tahun 2023.

**Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :**

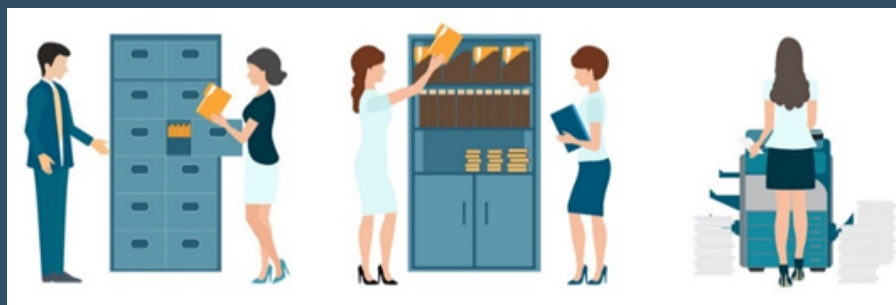
1. Melakukan koordinasi dengan pihak Qatar Museums, KBRI Doha, dan Kedutaan Besar Qatar di Jakarta untuk tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-festival dan non-selebrasi di Qatar pada bulan November dan Desember.
2. Menghimbau kepada Para Pengusul Untuk memahami tahapan-tahapan mengenai Pencairan bantuan pemerintah khususnya FBK Stimulan agar tidak ada revisi linimasa yg bisa menghambat kegiatan yg mereka usulkan
3. Melakukan pemetaan serta sosialisasi ZI WBK kepada seluruh satker Ditjen Kebudayaan sehingga pada tahun 2024 dapat diusulkan dan ditetapkan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merupakan satuan kerja yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sejak November 2020 hingga saat ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dipimpin oleh Fitra Arda dengan jumlah SDM sebanyak 215 pegawai. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan wilayah kerja sebanyak 32 satuan kerja/upt di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.



22 Jabatan Fungsional

9 Satker Pusat

130 PPNPN

23 BPK



32 Satker / UPT

215 Pegawai

83 PNS

2 Jabatan Struktural





## B. Dasar Hukum

### Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
10. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

## C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

### Tugas :

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas:

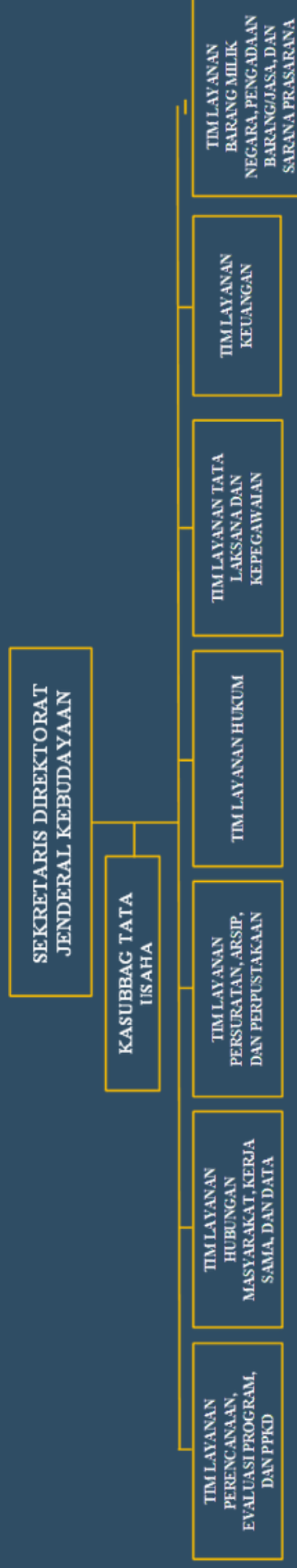
“Melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.”

### Fungsi :

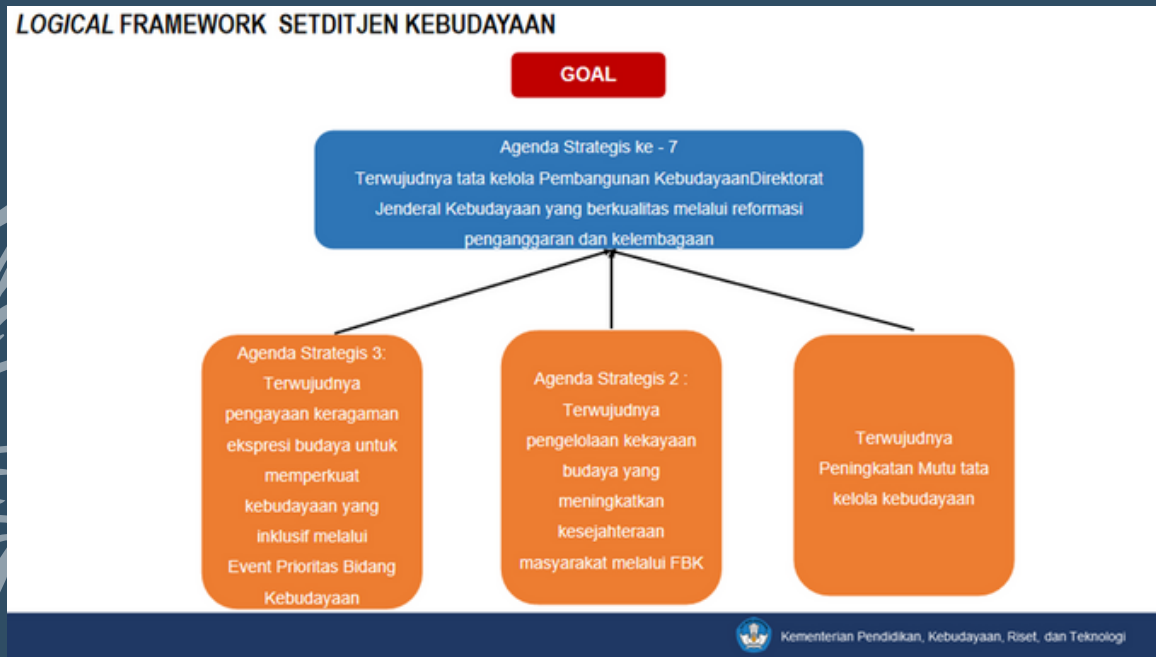
Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan
2. Pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang kebudayaan
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan
4. Koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal
5. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan serta fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal
8. Penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pamong budaya
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan
10. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal
11. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal

# STRUKTUR ORGANISASI



## D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi



### 1. Isu-isu Strategis

Belum optimalnya manajemen tata kelola di lingkungan Sekretariat Ditjen Kebudayaan, antara lain:

- Adanya Restrukturisasi Organisasi pada Ditjen Kebudayaan yang ditetapkan pada bulan Juni tahun 2022;
- Pelantikan kepala dan penempatan pegawai yang dilakukan di Satker Baru yaitu BPK dan UPT MCB baru ditetapkan pada bulan Februari 2023;
- Revisi anggaran yang dilakukan dan baru ditetapkan bulan Mei tahun 2023 sehingga percepatan pelaksanaan anggaran baru dapat dieksekusi sd bulan Juli 2023;
- Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan dalam pencaangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya;
- Peningkatan nilai sakin masih belum maksimal dikarenakan perubahan struktur organisasi; dan
- Proses perencanaan dan evaluasi kegiatan untuk pencapaian nilai kinerja penganggaran yang baru mencapai 94,13 dan belum optimal sehingga perlu banyak sinkronisasi dan evaluasi.

### 2. Peran Strategis

- a. Sesuai dengan agenda strategis yang ke-7 yaitu terwujudnya peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan;
- b. Mewujudkan pengelolaan warisan budaya sesuai dengan Agenda sta
- c. Penguatan proses Perencanaan dan Evaluasi di lingkungan Setditjen Kebudayaan melalui koordinasi secara intensif dari masing-masing pokja;



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

**Visi :** Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

**Misi :** Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

### Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan tiga sasaran dan empat indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian		Satuan	Target PK 2023	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024
1.0	SK Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan				
1.1	IKK Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan / Event	1	1	1
2.0	SK Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola				
2.1	IKK Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	150	180	200
3.0	SK Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan				
3.1	IKK Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	70	80
3.2	IKK Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1	10	10

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/ Event	3
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	150
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70
	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	10



Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	197.629.164.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	278.552.393.000
	<b>Total</b>	<b>476.181.557.000</b>

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp 476.181.557.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2023 DIPA Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp 444.879.003.000. Perubahan ini terjadi karena adanya beberapa kali pengembalian blokir Automatic Adjustment ke bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sepanjang tahun 2023. Selain dari segi anggaran, terdapat perubahan target dalam Perjanjian Kerja Tahun 2023 pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang semula ditargetkan 10 satuan kerja menjadi 1 satuan kerja. Perubahan target ini disebabkan karena adanya reorganisasi pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sehingga tidak memungkinkan mengusulkan satuan kerja untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di tahun 2023.

Adapun perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/ Event	3
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	150
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70
	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	1

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	169.258.466.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	275.620.537.000
	<b>Total</b>	<b>444.879.003.000</b>

## Program prioritas

### 1. Pekan Kebudayaan Nasional

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak 2019. Penyelenggaraan PKN 2023 kali ini menggunakan cara kerja Lumbung. Lumbung dapat diinterpretasikan sebagai wadah kolektif, di mana semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap kolektif/kelompok maupun individu dikumpulkan dan dikelola secara bersama, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud (gagasan, pengetahuan, tenaga, waktu). Tema utama PKN 2023 mengangkat isu “Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan” dengan rumusan: 1. Lumbung sebagai metode aksi; 2. Solusi budaya untuk merawat bumi; dan 3. Inspirasi lokal untuk pemecahan masalah global.

### 2. Kongres Kebudayaan Indonesia

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.” Usaha pemajuan tersebut dilaksanakan terhadap ekosistem dari sepuluh jenis Objek Pemajuan Kebudayaan: (1) Tradisi Lisan, (2) Manuskrip, (3) Adat istiadat, (4) Ritus, (5) Pengetahuan tradisional, (6) Teknologi tradisional, (7) Seni, (8) Bahasa, (9) Permainan rakyat dan (10) Olahraga tradisional.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 maka diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Indonesia. Kongres berhasil menelurkan Strategi Kebudayaan dan Rencana Aksi Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjabarkan arah pemajuan kebudayaan dalam 20 tahun mendatang dalam menjawab tantangan domestik maupun global yang dihadapi saat ini. Dokumen tersebut memuncak pada tujuh Agenda Strategis Pemajuan Kebudayaan:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

### 3. Qatar Year of Culture

Indonesia mendapat kehormatan dipilih sebagai Negara Mitra (partner country) dalam penyelenggaraan Qatar Year of Culture 2023. Year of Culture adalah program pertukaran budaya yang diprakarsai oleh Museum Nasional Qatar sejak tahun 2012 untuk mempromosikan saling pengertian, pemahaman dan penghargaan antar negara. Melalui program ini masyarakat diajak untuk mengeksplorasi dan merayakan persamaan budaya serta perbedaan yang dimiliki. Program ini akan diselenggarakan selama satu tahun penuh baik di Qatar maupun di Negara Mitra. Setiap tahun Pemerintah Qatar memilih satu negara sebagai negara mitra (partner country) dalam menyelenggarakan kegiatan pameran, festival, pertunjukan, kompetisi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya dalam lingkup seni, budaya, pendidikan, heritage, dan olahraga, baik di Qatar maupun negara mitra.

### 4. Fasilitasi Bidang Kebudayaan

Bantuan pemerintah fasilitasi kerja sama dengan instansi terkait, komunitas budaya, dan perguruan tinggi dalam bentuk dukungan penyelenggaraan seminar, sarasehan, workshop, temu akbar, maupun event budaya lainnya di bidang kebudayaan yang diselenggarakan di Jakarta maupun luar kota di Indonesia. Upaya promosi budaya di luar dan dalam negeri perlu difasilitasi oleh pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional. Program bantuan pemerintah fasilitasi bidang kebudayaan dalam bentuk dukungan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan antara lain Dokumentasi Karya/ Pengetahuan Maestro untuk komunitas/Lembaga, Pendayagunaan Ruang Publik untuk komunitas/Lembaga, dan juga Fasilitasi Bidang Kebudayaan bagi Komunitas dan Pelaku Budaya Interaksi Budaya dalam bentuk travel grants untuk dalam dan luar negeri.



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya pada akhir tahun. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja. Berikut di bawah ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya beserta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Selain itu, disajikan pula beberapa inovasi, penghargaan, dan program lintas sektoral (crosscutting) atau kolaborasi (collaboration) yang dilakukan dan diterima oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan.

### A. Capaian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan tiga Sasaran Kegiatan dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan seperti disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3	3	100 %
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150	300	200 %
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	70	100	143 %
	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1	0	0 %

Tabel 3.1 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2023

Uraian mengenai tingkat ketercapaian tiga sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan disajikan pada bagian berikut di bawah ini.

## Sasaran Kegiatan 1

### Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan

Ketercapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah Event Prioritas Bidang Kebudayaan yang Dilaksanakan.

Berdasarkan tabel 3.1, sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan pada tahun 2023 sudah tercapai. Ketercapaian sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan sesuai target, yaitu tiga event.

Uraian mengenai indikator kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Mega Events Kebudayaan disajikan pada bagian di bawah ini.

## Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

### Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

Event prioritas bidang kebudayaan adalah event berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan sebagai implementasi dari tujuh agenda strategis kebudayaan, yaitu:

1. menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan dengan menjamin data dukung yang terpadu dan berkelanjutan, pemerataan akses atas sarana-prasarana budaya serta peningkatan SDM kebudayaan.

Penghitungan Indikator kinerja kegiatan Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan dilakukan secara internal oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tipe penghitungan adalah non kumulatif.



Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan sesuai dengan target, yaitu tiga event atau tingkat ketercapaian indikator kinerja kegiatan ini mencapai 100%..

Realisasi indikator kinerja kegiatan pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2024, target indikator kinerja kegiatan ini tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu tiga event.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan didukung oleh tiga komponen, yaitu:

1. Pekan Kebudayaan Nasional;
2. Kongres Kebudayaan Indonesia; dan
3. Festival Qatar.

Uraian mengenai komponen yang mendukung realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan disajikan pada bagian berikut di bawah ini.

### 1. Pekan Kebudayaan Nasional

Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) adalah perhelatan akbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak 2019. Penyelenggaraan PKN 2023 kali ini menggunakan cara kerja Lumbung. Lumbung dapat diinterpretasikan sebagai wadah kolektif, di mana semua sumber daya yang dimiliki oleh setiap kolektif/kelompok maupun individu dikumpulkan dan dikelola secara bersama, baik yang berwujud dan yang tidak berwujud (gagasan, pengetahuan, tenaga, waktu). Tema utama PKN 2023 mengangkat isu “Merawat Bumi, Merawat Kebudayaan” dengan rumusan:

1. Lumbung sebagai metode aksi.
2. Solusi budaya untuk merawat bumi.
3. Inspirasi lokal untuk pemecahan masalah global.



Lumbung dalam konteks PKN 2023 merupakan sebuah metode dan cara kerja yang berdasar pada serangkaian nilai: humor, kemurahan hati, keingintahuan, sikap memadai dan berhemat, kemandirian, berakar pada lokalitas & ekosistem lokal, keberlangsungan, transparansi-kepercayaan, regenerasi, serta etika dan keberpihakan. Sejak Juli hingga Oktober 2023 di 50 lebih kota dan kabupaten se-Indonesia, proses-proses yang berlangsung telah melalui siklus rawat-panen-bagi. PKN 2023 menjadi ruang untuk perayaan ritual berbagi dari siklus panjang tersebut dan diharapkan bisa berlanjut setelahnya.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan Provinsi diarahkan untuk mengirimkan surat komitmen keterlibatan PKN pada saat sosialisasi bersama Direktur Jenderal Kebudayaan, dan 20 provinsi hadir di Jakarta untuk mengikuti lokakarya kuratorial PKN, yang kemudian bertambah hingga puncak perayaan meskipun masih ada beberapa daerah yang tidak melanjutkan komitmennya. Dari total 27 provinsi yang terdata, 22 daerah yang mengirim surat resmi untuk berkomitmen di PKN, dan hanya 19 daerah yang berpartisipasi dengan dukungan juga dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

PKN 2023 mencoba mengubah paradigma pola kompetisi berjenjang, seperti pada PKN tahun-tahun sebelumnya, menjadi kolaborasi antar pelaku budaya. Penyelenggaraan PKN 2023 juga dilakukan tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi tersebar ke 40 ruang-ruang seni budaya, ruang komunitas seni- budaya dan warga, ruang publik seperti stasiun, pasar, taman, dan gedung lembaga pemerintah di Jabodetabek. Lokus-lokus penyelenggaraan tersebut diubah menjadi “Ruang Tamu”, tempat dimana proses edukasi, apresiasi, dan kreasi selama PKN 2023 dirayakan dan dibagikan. Ruang Tamu PKN yang tersebar di Jakarta dan daerah sekitar menjadi tempat di mana kolaborator PKN dan publik bertemu, berbagi ide, gagasan, pengetahuan, menjamu, dan dijamu.

Metode pelumbungan tertuang ke dalam delapan kuratorial PKN 2023 dengan total. Masing-masing mewakili fokus program yang berbeda-beda.

1. Kuratorial “Temu Jalar” berfokus pada pertukaran sumber daya jejaring kolektif seni di Indonesia, jejaring forum seni mahasiswa, penulisan estetika seni kolektif, serta olah artistik teknologi akal- akalan warga. 4 (empat) mata program utama diantaranya yaitu:



- a. "Tarkam AKAP" (Tarung Kampus Antar Kota Antar Provinsi), forum dan pameran di ruang publik oleh mahasiswa di Kupang, Manado, Medan, Samarinda, Malang, Jakarta;
- b. "Akai-akalan Warga", riset di Kepulauan Maluku, Kepulauan Maluku Utara, dan Papua Barat mengenai produk dan teknologi warga;
- c. "Lumbung Indonesia", forum dan pameran komunitas seni dari Solok, Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Surabaya, Palu, Makassar, Lombok Utara, Maumere;
- d. Buku tentang "Estetika Kolektif Indonesia", riset dan penerbitan mengenai praktik kesenian oleh kolektif seni di Indonesia;
- e. Festival Sungai, berbeda dengan pawai, kegiatan bertujuan mengaktivasi sungai sebagai budaya dengan menghadirkan parade rakit hias di sepanjang aliran Banjir Kanal Timur yang turut diikuti oleh pemda dan komunitas sebagai rangkaian akhir pada puncak perayaan PKN 2023.

2. "Laku Hidup" mengembangkan gagasan tentang tari sebagai praktik koreografi yang lahir, tumbuh, dan berkembang pada praktik keseharian di ruang sosial masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) turunan kegiatan dalam kuratorial Laku Hidup seperti:

- a. Laku Dalam Ruang, residensi dengan presentasi akhir dari kolaborasi 2 pelaku residensi yang mengikuti seleksi terbuka di setiap daerah dengan masing-masing mitra kolaborator di Jayapura, Timika, Enrekang, Bandar Lampung, Solo, Tanah Datar, Banjarmasin, Samarinda, dan Bekasi.
- b. Laku Cipta
- c. Tari dan Inklusivitas
- d. Jejaring Produser Indonesia
- e. Lingkar-Dalam-JKT, pelatihan dengan komunitas tari dan teater dari 5 wilayah DKI Jakarta yang kemudian dipertunjukkan di PPSB Kota Administrasi Jakarta
- f. Lokakarya Pelaku Penunjang Seni Pertunjukan, kegiatan yang berdampingan dengan Lingkar-Dalam-JKT
- g. Membaca Pakem: Tubuh dan Tanda



3. “Gerakan Kalcer” mengupayakan potensi khazanah budaya sebagai fondasi ekonomi kreatif, perumusan jenama kota (city branding), dan cipta ruang dalam membangun kota. Kegiatan berlangsung di 3 (tiga) kota, Bandung, Bali, dan Jakarta untuk program Lokakarya Penjenamaan Kota dan Penciptaan Ruang, serta Festival Kalcer di 2 (dua) kota, Padang dengan Festival Pusako, dan Jakarta dengan Festival Kata Kota Kita;

4. “Rantai Bunyi” menelusuri musik Nusantara, sebagai sebuah model, pada saat ini berfokus pada dawai nyanyian, menghubungkan unsur bunyi, suara, derau dengan ekspresi keseharian masyarakat nusantara yang partikular dan beragam. 5 (lima) daerah dipilih oleh kuratorial menjadi model mewakili masing-masing Kepulauan di Indonesia, seperti Bangka Belitung, Pontianak, Baubau, Maumere, dan Jayapura;

5. “Jejaring, Rimpang” melakukan kerja-kerja demokratisasi, normalisasi pembuatan, penggunaan, dan pengkajian arsip dalam budaya kontemporer dengan meneruskan dan mengembangkan serangkaian kerja yang sudah berjalan selama ini. Jejaring, Rimpang mengajak 7 (tujuh) jaringan atau komunitas, yaitu:

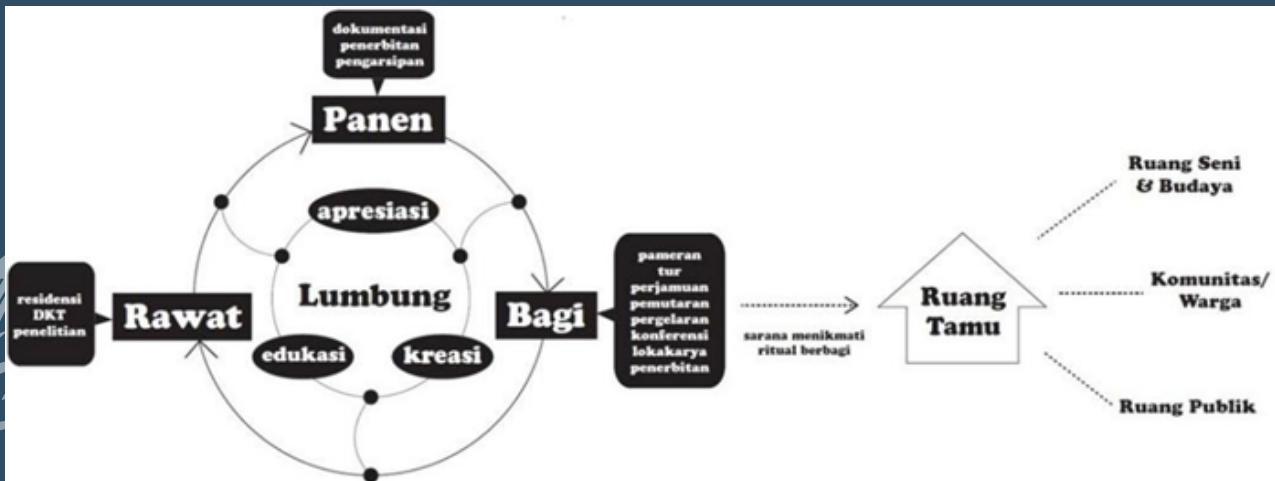
- a. Danarto dkk.,;
- b. Hyphen—;
- c. Indeks,
- d. Jurnal Karbon;
- e. Kenduri Rasa;
- f. Nayamullah, dan
- g. Perempuan Komponis.



6. “Pendidikan Berkebudayaan” berfokus pada isu-isu pendidikan dengan menempatkan perkembangan integritas budi pekerti dalam konteks keadaan dan zaman;

7. “Berliterasi Alam dan Budaya” mengupayakan sebaran pemahaman akan praktik swadaya dan swakelola berkesadaran lingkungan berkelanjutan, baik secara siklus materi, potensi konflik politik, maupun sosial;

8. “Sedekah Bumi Project” mengupayakan revitalisasi tradisi dengan memaknai kembali peran tradisi dalam ekosistem kebudayaan hari ini.



Siklus strategi pelumbungan dan persentasi publik PKN 2023 "Rawat, Panen, Bagi"

## 2. Kongres Kebudayaan Indonesia

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2023 merupakan momentum yang sangat penting sebagai ruang berkumpulnya pemangku kepentingan bidang kebudayaan untuk merembukkan arah pembangunan kebudayaan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Pada kongres ini, membicarakan kebudayaan sebagai suatu produk yang lahir dari masyarakat, sekaligus kebudayaan sebagai landasan pembangunan peradaban bangsa. KKI 2023 diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan memajukan kebudayaan nasional sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan implementasi dokumen Strategi Kebudayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. KKI 2023 terlaksana sebagai ruang berkumpul bagi para pemangku kepentingan untuk berdialog menyampaikan pendapat agar pembangunan kebudayaan Indonesia lebih terarah, berdampak, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.



Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 27 Oktober 2023 di kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan menjadi bagian dari penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 terdapat lebih dari 50 sesi diskusi dengan berbagai format yang menarik seperti Artist Talk, Book Launch, Keynote Speech, Diskusi Panel, dan Pidato Kebudayaan. Selain itu juga terdapat lebih dari 350 narasumber inspiratif yang membahas berbagai isu kebudayaan Indonesia secara mendalam dan holistik.

Melalui Kongres Kebudayaan Indonesia, telah dihasilkan setidaknya sepuluh gagasan penting dalam pemajuan kebudayaan Indonesia. Adapun sepuluh gagasan tersebut yaitu :

1. Menegaskan kebudayaan sebagai daya utama dalam mewujudkan transformasi ke-Indonesiaan;
2. Periode 2024-2029 merupakan babak krusial dalam pemajuan kebudayaan;
3. Kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman;
4. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan “sekolah kehidupan,”;
5. Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan;
6. Perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif;
7. Teknologi digital untuk mengolah data raya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat;
8. Masyarakat adat dan lokal lainnya merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya;
9. Indonesia memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan; dan
10. Model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.

Butir-butir gagasan dalam kongres ini disusun sebagai Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029, yang akan menjadi blueprint untuk kebijakan kebudayaan nasional Indonesia selama lima tahun mendatang. Sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah tonggak awal transformasi dan awal dari komitmen bersama untuk mewujudkan kebudayaan yang berkelanjutan, Para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan rumusan KKI 2023 ini sebagai pijakan utama untuk melangkah ke depan, melakukan aksi nyata untuk kebudayaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.





### 3. Festival Qatar

Indonesia mendapat kehormatan dipilih sebagai negara mitra dalam penyelenggaraan Year of Culture (YoC) atau Tahun Kebudayaan untuk edisi tahun 2023. YoC adalah program diplomasi budaya yang diprakarsai oleh Qatar sejak tahun 2012 untuk mempromosikan pertukaran budaya dan memperkuat hubungan antar masyarakat. Dipilihnya Indonesia sebagai negara mitra didasarkan oleh pertimbangan akan kekayaan budaya dan perkembangan industri kreatif yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, diaspora Indonesia di Qatar memiliki keterlibatan yang aktif dalam mewarnai kegiatan-kegiatan seni budaya di negara teluk tersebut. Sebagai informasi, negara-negara mitra dalam kegiatan ini sebelumnya juga adalah negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan kebudayaan global seperti Jepang (2012), Inggris Raya (2013), Brazil (2014), Turkiye (2015), Tiongkok (2016), Jerman (2017), Rusia (2018), India (2019), Perancis (2020), dan Amerika Serikat (2021).

Pelaksanaan Qatar-Indonesia Year of Culture 2023 dilakukan secara pemerintah-ke-pemerintah (government-to-government) dengan koordinasi dengan otoritas terkait (counterpart) di Qatar yaitu Museum Nasional Qatar, Perpustakaan Nasional Qatar, dan beberapa institusi-institusi kebudayaan lainnya. Di samping itu, kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak di Indonesia, seperti pemerintah daerah, universitas, lembaga kebudayaan, dan komunitas-komunitas seni dan budaya yang tersebar di berbagai provinsi. Pelibatan para pemangku kepentingan di ekosistem kebudayaan terbagi dalam sejumlah peran, baik sebagai perencana bersama, pemberi masukan, pelaksana, maupun peserta aktif. Beberapa yang terlibat di antaranya: Yayasan Mudra Swari Saraswati, Dewan Kesenian Jakarta, Ikatan Pencak Silat Indonesia, Forum Taman Bacaan Masyarakat, Institut Kesenian Jakarta, Institut Seni Indonesia Surakarta, Yayasan Aku Cinta Masakan Indonesia, dll.





## Hambatan & Permasalahan

1. Anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodir dan memfasilitasi kreativitas para kurator dan kolaborator;
2. Keterbatasan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan: banyaknya para pemangku kepentingan di berbagai titik pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional dan keterbatasan SDM panitia PKN membuat koordinasi kurang berjalan lancar;
3. Pemahaman akan sisi administrasi belum sama antara tim kurator dan tim ditjen kebudayaan;
4. Perubahan konsep yang berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya membuat tingkat partisipasi dari Daerah yang masih belum persepsi terkait bentuk kegiatan PKN, tidak semua daerah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam kegiatan PKN Tahun 2023;
5. Sistem administrasi dan jalur birokrasi yang ada di Qatar dan Indonesia memiliki banyak perbedaan. Hal tersebut berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pimpinan di level tinggi yang tidak seragam, terkadang dapat berlangsung cepat, namun seringkali juga bisa tertunda cukup lama;
6. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Qatar di Indonesia dilakukan dengan bantuan pihak penyelenggara teknis dari perusahaan swasta. Hal tersebut menambah banyak lapis koordinasi yang harus dilakukan dan memperpanjang jalur koordinasi antara Kemdikbudristek dengan Qatar Museums;
7. Konflik yang terjadi di Palestina sejak bulan Oktober 2023 menyebabkan beberapa kegiatan yang sifatnya selebrasi atau keceriaan harus ditunda atau dibatalkan. Beberapa kegiatan serupa juga tetap dapat dilangsungkan namun dikurangi skalanya. Hal ini dilakukan oleh Qatar sesuai dengan prinsip solidaritas sebagai sesama negara Arab. Permasalahan timbul karena beberapa kegiatan sudah direncanakan secara hampir matang oleh beberapa seniman di Indonesia.

## Langkah Antisipasi

1. Perencanaan yang matang yang sudah dilakukan setahun sebelumnya;
2. Sinergi antar instansi perlu diperkuat, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri;
3. Komunikasi yang efektif antara tim kurator dan tim ditjen kebudayaan;
4. Dilakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak Qatar untuk saling memahami konteks dan tata administrasi yang berlaku di masing-masing negara;
5. Melakukan beberapa pertemuan dengan pihak perusahaan swasta yang ditunjuk oleh Qatar Museums sebagai penyelenggara;
6. Menyelenggarakan beberapa koordinasi untuk membatalkan atau mengalihkan sumber daya yang sebelumnya dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya selebrasi atau keceriaan untuk kegunaan lainnya.

## Strategi Pencapaian Target

- Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar stakeholder yang terkait dalam setiap event;
- Memberikan surat pemberitahuan kepada kedutaan negara dan KBRI untuk berkoordinasi secara langsung; dan
- Melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal perubahan dan memastikan kondisi sarana dan prasarana di lapangan telah siap digunakan.

## Sasaran Kegiatan 2

### Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Ketercapaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan, yaitu: Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola.

Berdasarkan tabel 3.1, sasaran kegiatan Meningkatkan jumlah mega events kebudayaan pada tahun 2023 sudah tercapai. Ketercapaian sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola melebihi target yang ditetapkan, yaitu 300 orang/kelompok masyarakat.

Uraian mengenai indikator kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan Meningkatkan Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola disajikan pada bagian di bawah ini.

### Indikator Kegiatan 2.1

#### Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk dana hibah yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/ pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersial serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) secara luas.



Penghitungan Indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola dilakukan secara internal oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tipe penghitungan non kumulatif.

Realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan ini didukung oleh satu komponen, yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan tahun 2023 terdiri dari dua kategori, yaitu Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya (FBK IB) dan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya. Uraian mengenai pelaksanaan kedua kategori Fasilitasi Bidang Kebudayaan tersebut disajikan pada bagian berikut.

#### a. FBK Interaksi Budaya

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya adalah bantuan pemerintah dalam bentuk pengiriman perseorangan atau kelompok untuk menjadi delegasi budaya baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dalam rangka menghadiri forum domestik atau internasional yang diselenggarakan oleh komunitas, Lembaga atau organisasi internasional bidang kebudayaan atau kegiatan kebudayaan dengan tujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, serta mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Tema FBK IB tahun 2023 adalah Kebudayaan untuk Merawat Bumi. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya Tahun 2023 yaitu untuk:

1. Meningkatkan peran Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan;
2. Meningkatkan pengaruh Indonesia dalam forum pengambilan keputusan tingkat internasional bidang kebudayaan;
3. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi publik internasional terhadap kebudayaan Indonesia dalam perhelatan budaya tingkat dunia;
4. Mewujudkan pengarusutamaan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional;
5. Memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem pemajuan kebudayaan; dan
6. Mendorong masyarakat untuk menciptakan karya kreatif dan inovatif terkait tantangan isu kebudayaan di masa kini.

Pelibatan dari ekosistem untuk Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya adalah Warga Negara Indonesia secara umum atau individu, komunitas, lembaga bidang kebudayaan dimiliki oleh WNI yang mengajukan permohonan fasilitasi serta instansi pemerintah lain seperti perwakilan Indonesia di luar negeri (kedutaan atau konsulat jenderal) yang menjadi mitra dalam memvalidasi atau merekomendasikan suatu kegiatan yang diajukan pengusul. Capaian kegiatan FBK IB adalah difasilitasinya perjalanan dalam rangka menghadiri bidang kebudayaan dengan total 222 pengajuan yang diterima sepanjang tahun 2023.

#### **b. FBK Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya**

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya Tahun 2023 adalah pendudukan dana stimulan kepada perseorangan, komunitas budaya, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan sebagai bentuk dukungan tambahan setelah penerima mendapatkan dana dari masyarakat umum dalam upaya melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan. Tema FBK Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya Tahun 2023 adalah Kebudayaan untuk Merawat Bumi. Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya yaitu untuk:

1. Memperluas akses masyarakat pada sumber pendanaan untuk memperkuat keterlibatan publik dalam ekosistem pemajuan kebudayaan;
2. Mendorong rasa kepemilikan, keterikatan, gotong royong dan tanggung jawab publik terhadap pemajuan kebudayaan.

Capaian penerima bantuan dana stimulan tahun 2023 sebanyak 78 Pengusul dari perseorangan, komunitas budaya, atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya Tahun 2023 melibatkan para pelaku budaya, pemerhati budaya dan masyarakat umum yang berperan dalam penggagas ide, gagasan dan ikut serta dalam berkegiatan di bidang kebudayaan.

### **Faktor Keberhasilan**

Salah satu faktor keberhasilan realisasi pada Indikator Kinerja ini mencapai 300 penerima fasilitasi dengan capaian 200% adalah karena kegiatan Fasilitasi Bidang Kebudayaan didasarkan pada proposal sehingga dapat mengoptimalkan jumlah output tanpa mengurangi unit cost. Dengan capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 300 komunitas maka jika konsisten sampai akhir tahun renstra target di tahun 2024 dapat terpenuhi, bahkan lebih.

### **Hambatan & Permasalahan**

- Usulan kegiatan yang diajukan masih banyak yang belum sesuai dengan kriteria yang ditentukan di dalam petunjuk teknis;
- Kurangnya SDM dalam pengelolaan manajemen atau kesekretariatan FBK 1B;
- Proses validasi kegiatan yang diajukan pengusul;
- Banyak kegiatan yang berulang-ulang atau kegiatan tahunan seperti kegiatan hari besar, contoh kecilnya HUT RI atau Sumpah Pemuda tanpa diberi dukungan/bantuan mereka sudah bisa menjalankan kegiatan tersebut;
- Dilihat dari hasil penggalangan dana FBK Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya Tahun 2023 , masih kurang antusias Masyarakat umum untuk membantu kegiatan seni dan budaya, penggalangan dana masih sekitar teman serta anggota komunitas atau kelompok seni dan budaya itu sendiri;
- Linimasa kegiatan yang terlalu dekat dengan pengajuan proposal kegiatan, sehingga terjadinya revisi linimasa atau pengunduran kegiatan, karena untuk sampai ke tahap pencairan dana FBK Stimulan perlu beberapa tahapan dari pengusul dinyatakan lolos review.



## Langkah Antisipasi

- Memberikan penjelasan kegiatan seperti apa yang dapat lulus review sesuai dengan petunjuk teknis;
- Membagi pekerjaan secara jelas untuk substansi maupun pencairan pembiayaan;
- Proses validasi kegiatan yang diajukan selain dilakukan dengan mencari informasi yang tertera di dalam undangan, sekretariat perlu mengecek secara daring melalui laman ataupun unit pelaksana teknis Ditjenbud yang ada di daerah atau perwakilan Indonesia di negara yang akan dituju pengusul FBK IB;
- Untuk para pengusul agar lebih mengembangkan lagi ide-ide kreatif serta inovasi dalam hal kegiatan seni dan budaya serta disesuaikan dengan tema sesuai petunjuk teknis;
- Para pengusul FBK Stimulan (Perseorangan, Komunitas Budaya, kelompok, dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan) lebih banyak pendekatan dengan Masyarakat umum serta sponsor2 yang peduli dengan budaya.

## Strategi Pencapaian Target

- Membuat pembaruan perangkat lunak yang ada di sistem website FBK;
- Mendorong pengembang aplikasi untuk melakukan percepatan pemindahan domain baru;
- Memberikan ruang untuk tanya jawab terhadap peserta yang kesulitan karena keterlambatan waktu melalui help desk;
- Melakukan sosialisasi terkait perpindahan sistem dari laman fbk.id ke laman [danaindonesiana.kemdikbud.go.id](http://danaindonesiana.kemdikbud.go.id);
- Memaksimalkan sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk melaksanakan verifikasi lapangan kepada pengusul FBK.



## Sasaran Kegiatan 3

### Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

Ketercapaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Berdasarkan tabel 3.1, sasaran kegiatan Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan pada tahun 2023 belum tercapai sepenuhnya. Ketercapaian sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dengan capaian melebihi target, yaitu 100% dan indikator kinerja kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang tidak mencapai target. Uraian mengenai indikator kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran kegiatan Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan disajikan pada bagian di bawah ini.

#### Indikator Kegiatan 3.1

##### **Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, SAKIP diartikan sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.



Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB didapatkan dengan membandingkan antara jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai SAKIP minimal BB dengan jumlah seluruh satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dinilai kinerjanya. Pada tahun 2023 dari 7 satker di Direktorat Jenderal Kebudayaan, semuanya mendapatkan predikat A,

Penghitungan Indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB bersumber dari laporan hasil evaluasi SAKIP dengan tipe penghitungan kumulatif. Adapun metode penghitungan yang digunakan adalah sebagai berikut.

**% satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB =**

$(\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIP-nya minimal BB}) / (\text{Jumlah Satker Ditjen Kebudayaan yang dinilai SAKIP-nya}) \times 100\%$



Indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB merupakan indikator kinerja kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak tahun 2022 untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraannya SAKIP-nya telah mencapai predikat minimal BB.

Pada tahun 2023 realisasi Indikator kinerja kegiatan ini berhasil melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 100% atau atau tingkat ketercapaian indikator kinerja kegiatan ini mencapai 142,86% dari target 70%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh pencapaian predikat SAKIP dari tujuh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dievaluasi atau dinilai penyelenggaraan SAKIP-nya, sedangkan 25 satuan kerja lainnya tidak dilakukan penilaian karena merupakan satuan kerja baru hasil reorganisasi. Adapun rincian nilai dan predikat atas tujuh satuan kerja yang dinilai penyelenggaraan SAKIP-nya di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kode Satker	Satuan Kerja / Direktorat	Nilai SAKIP 2020		Nilai SAKIP 2021		Nilai SAKIP 2022		Nilai SAKIP 2023	
	15	DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	70,27	BB	81,24	A	81,40	A	86,35	A
1	189646	DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN MASYARAKAT ADAT	83,27	A	86,92	A	87,75	A	85,35	A
2	690433	DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN	-	-	83,51	A	86,65	A	88,05	A
3	690432	DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK DAN MEDIA	-	-	70,72	BB	85,60	A	90,00	A
4	189643	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	75,27	BB	80,62	A	80,95	A	87,60	A
5	690434	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN	-	-	76,37	BB	80,75	A	87,10	A
6	690435	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN	-	-	74,85	BB	80,15	A	89,00	A
7	902745	SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM	-	-	75,05	BB	79,60	BB	82,60	A

Realisasi indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024 target indikator kinerja kegiatan ini tidak mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.

Realisasi Indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB didukung oleh dua layanan, yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Uraian mengenai kegiatan yang mendukung realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB disajikan pada bagian berikut di bawah ini.

1. Melakukan pemetaan SK dan IKK yang diampu oleh satuan kerja baru di Ditjen Kebudayaan;
2. Penyusunan rencana strategis dan definisi operasional Ditjen Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi satker/UPT baru yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana strategis satker/UPT;
3. Sosialisasi, koordinasi dan pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan Tahun 2023 pada Januari dan Juni 2023. Penyusunan Perjanjian Kinerja satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan dilakukan dua kali dalam setahun karena adanya reorganisasi;
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada bulan Juni 2023 dikhususkan bagi UPT baru yakni UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya;
5. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi atas PK satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan Tahun 2023;
6. Melaksanakan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan pada 5 s.d 8 Juli 2023;
7. Pendampingan penginputan pengukuran kinerja triwulanan;
8. Pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan revisi Perjanjian Kinerja satuan kerja Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
9. Evaluasi program dan kegiatan internal triwulanan bersama seluruh satker/UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

### **Faktor Keberhasilan**

Untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berusaha untuk melakukan pendampingan kepada satuan kerja dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ini merupakan faktor keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB. Pendampingan dilakukan khususnya pada penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA yang mengalami banyak pengembangan di tahun 2023.



## Hambatan & Permasalahan

- Adanya misinformasi mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 bagi satuan kerja baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Terdapat beberapa kendala teknis pada menu pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA khususnya terkait penggunaan akun KPA yang merupakan fitur baru di tahun 2023;
- Belum terpetakannya SK dan IKK satker baru di aplikasi SPASIKITA dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan data pemetaan SK dan IKK tersebut;
- Terdapat beberapa kendala teknis pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja Satker baru di aplikasi SPASIKITA, khususnya pada akun satuan kerja baru (belum ada akun satker sebelumnya); dan
- Berubahnya SDM tim operator di beberapa satker yang belum memahami implementasi SAKIP dan penggunaan aplikasi SPASIKITA.

## Langkah Antisipasi

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan hasil satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan tetap menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan nomenklatur eksisting, sedangkan Perjanjian Kinerja satuan kerja dengan nomenklatur baru dibuat setelah terbitnya DIPA baru;
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro perencanaan dan tim pengembang SPASIKITA terkait kendala-kendala teknis pada aplikasi;
- Mengirimkan data pemetaan SK dan IKK satker baru kepada Biro Perencanaan untuk digunakan sebagai acuan database di aplikasi SPASIKITA; dan
- Melakukan asistensi dan selalu berkoordinasi dengan operator baru terkait implementasi SAKIP termasuk dalam pemanfaatan aplikasi SPASIKITA.

## Strategi Pencapaian Target Kinerja

- Menyiapkan draft Perjanjian Kinerja tahun 2023 di awal tahun sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah diusulkan pada revisi Rencana Strategis 2023-2024;
- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Kebudayaan khususnya mengenai peraturan terbaru terkait implementasi dan evaluasi SAKIP;
- Menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku Eselon I untuk menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis; dan
- Koordinasi dan pendampingan dalam setiap tahap penyusunan dokumen pendukung SAKIP yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA.

### Indikator Kegiatan 3.2

#### Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan salah satu predikat tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan program pembangunan Zona Integritas dengan mengusulkan satuan kerja di bawah Ditjen Kebudayaan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, predikat ZI-WBK/WBBM diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi Birokrasi tata kelola bidang Kebudayaan diselenggarakan dalam kerangka Pemajuan Kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dilakukan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Penghitungan Indikator kinerja kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dilakukan secara internal oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang didasarkan pada surat usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal dengan tipe penghitungan non kumulatif.



Pada tahun 2023 realisasi Indikator kinerja kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 0% dari target 1 (satu) satuan kerja yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Realisasi indikator kinerja kegiatan pada tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, pada tahun 2024, target indikator kinerja kegiatan ini meningkat apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu 10 satuan kerja.

Jika dibandingkan dengan IKK tahun sebelumnya (2022) terlihat menurun dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi Satuan Kerja yang ada di lingkungan Ditjen Kebudayaan sehingga ketercapaian Jumlah Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dapat dikatakan tidak dapat terpenuhi dikarenakan pada tahun 2023 sedang dilaksanakan penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sehingga persentase capaian indikator program yang tidak mencapai target.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM didukung oleh dua layanan, yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal;
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal.

Uraian mengenai kegiatan yang mendukung realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM disajikan pada bagian berikut di bawah ini.

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2. Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM;
3. Mendorong Satuan Kerja untuk memperbaiki system reformasi birokrasi di masing-masing unit;
4. Peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai;
5. Melakukan koordinasi dengan tim APIP untuk memastikan terselesaikannya kepatuhan sebelum pengusulan;
6. Memonitoring pelaksanaan survei satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal;
7. Mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 14641/F/OT.01.00/2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan tanggal 9 November 2023 yang ditujukan kepada Para Pimpinan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan menerapkan langkah-langkah, sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pencaanangan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi;
  - b. Membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi;
  - c. Melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - d. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

- e. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan;
- f. Membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal "B";
- g. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas; dan
- h. Menyusun manajemen risiko unit kerja.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 5285/F.FI/OT.00.02/2023 Tentang Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2023, Sekretariat Ditjen Kebudayaan menetapkan . Berikut Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2023.

No	Nama	Jabatan	Bidang Perubahan	Program Perubahan
1	Tri Adi Saniscara	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melayani pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;</li> <li>b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di satuan kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan</li> </ul>
2	Rakhmat Setyadi	Analisis Organisasi	Layanan Jabatan Fungsional Pamong Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melayani pejabat fungsional Pamong Budaya terkait terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;</li> <li>b. Mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Kepada seluruh Pamong Budaya di lingkungan Direktorat Jenderal</li> </ul>

**Tabel: Anggota Agen Perubahan**



## Faktor Kegagalan

Mereformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja orang pegawai. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak terutama para pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini masyarakat sangat kritis dalam menilai kinerja instansi pemerintah terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang akan menilai apakah instansi pemerintah sudah reform atau belum. Hal terpenting bagi masyarakat dari pemerintah adalah pelayanan publik berkualitas baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui Surat Sekretaris Ditjen. Kebudayaan Nomor: 4971/F1/OT.00.01/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal: Satuan Kerja ZI-WBK dan ZI-WBBM kepada Yth. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bahwa pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak dapat mengusulkan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai calon ZI-WBK atau ZI-WBBM disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. adanya perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
2. sampai dengan saat ini masih dalam proses:
  - a. penataan Sumber Daya Manusia, yaitu mutasi jabatan dan perpindahan SDM dari satuan kerja lama ke satuan kerja baru;
  - b. penataan aset/BMN satuan kerja.

## Hambatan & Permasalahan

- Belum terinternalisasinya informasi Reformasi Birokrasi kepada semua Pegawai;
- Pengisian respon responden tentang pelayanan pada aplikasi SIAZIK menjadi acuan pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM dimana pada unit Ditjen Kebudayaan belum memenuhi minimal jumlah responden;
- Perubahan organisasi dan penataan Sumber Daya Manusia menjadi efektifitas dalam penguatan organisasi Ditjen Kebudayaan, namun menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan RBI karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti pola tugas dan fungsi layanan perubahan organisasi yang terjadi;
- Adanya perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, antara lain :
  - Perubahan 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya dan 14 Balai Pelestarian Cagar Budaya menjadi 23 Balai Pelestarian Kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
  - Penggabungan seluruh museum dibawah unit Ditjen Kebudayaan, Balai pelestarian Sangiran Manusia Purba dan Balai Konservasi Brobudur dan Museum yang dibangun oleh Ditjen Kebudayaan namun tidak mau diambil oleh pemerintah daerah menjadi satker UPT Museum dan Cagar Budaya; dan
  - Pembentukan UPT Balai Media Kebudayaan terkait untuk produksi konten dan platform Indonesiana TV.
- Penyesuaian tugas dan fungsi UPT Kebudayaan setelah dilakukan penggabungan; dan
- Mutasi Pegawai secara masih pada UPT di lingkungan Ditjen. Kebudayaan

## Langkah Antisipasi

- Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Melakukan koordinasi dalam pengisian LKE PMPRB ZI WBK WBBM dan melengkapi dokumen pendukungnya;
- Penyusunan peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan;
- Melakukan sosialisasi rencana sasaran strategis general dan tematik seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan agar menjadi perhatian dan terlibat dalam proses pencapaian ukuran keberhasilan.;
- Agar hasil evaluasi ex-ante (evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan) menjadi bahan perbaikan rencana aksi;
- Mendorong unit kerja yang belum memenuhi target kinerja Kementerian yaitu nilai SAKIP "A" agar meningkatkan perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi.

- Mendorong unit kerja untuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

### Strategi Pencapaian Target

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- Pendampingan intensif terhadap Satuan Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/ WBBM;
- Mendorong Satuan Kerja untuk memperbaiki sistem reformasi birokrasi di masing-masing unit;
- Melakukan pendampingan penyusunan SAKIP kepada satker - satker Ditjen Kebudayaan;
- Menyusun peta proses bisnis/SOP untuk pelaksanaan kegiatan;
- Peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai; dan
- Melakukan koordinasi dengan seluruh pokja melalui rapat rutin terkait evaluasi pelaksanaan anggaran.

## B. Realisasi Anggaran

### 1: Capaian Anggaran

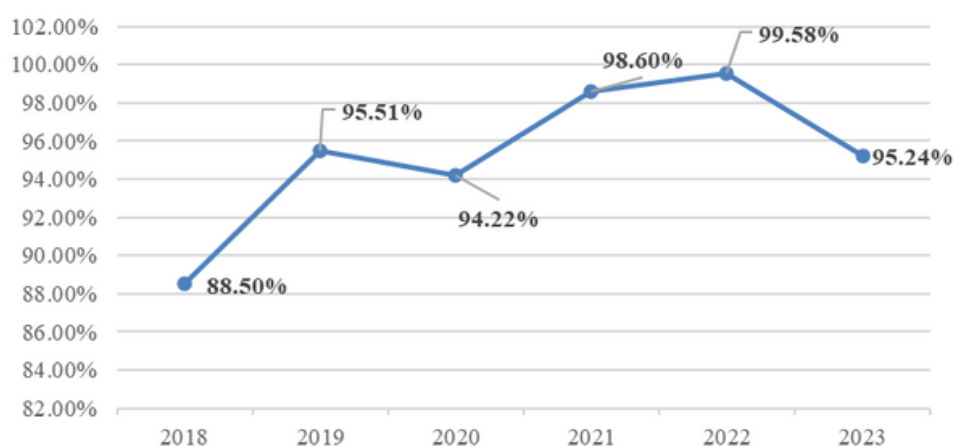
Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp 476.181.557.000 sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, namun sepanjang tahun 2023 DIPA Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan menjadi Rp 444.879.003.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 423.691.022.380 dengan persentase daya serap sebesar 95,24%. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2023 mengalami penurunan daya serap. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja.



Adapun realisasi anggaran untuk masing-masing Sasaran Indikator Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Rp 120.179.302.00 0	Rp111.291.419. 792	92.60%
[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Rp 49.079.164.000	Rp 46.742.943.7 13	95.24%
[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB [IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Rp 275.620.537.00 0	Rp 265,656,658, 875	96.38%

Tren Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan



## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan perubahan anggaran sebesar 6.57% atau sebesar Rp. 31.302.554.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 476.181.557.000 dengan rata-rata capaian IKK 110.75% dari 4 IKK. Hasil perubahan tersebut diperoleh dari :

1. Pergeseran anggaran dari belanja pegawai ke operasional untuk satker/unit lain;
2. Pengembalian blokir AA ( Automatic Adjustment) pada kegiatan even Prioritas kebudayaan, yaitu festival Qatar; dan
3. Relokasi anggaran dari Festival Qatar ke Fasilitas Bidang Kebudayaan.

## C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

### 1. Inovasi

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan inovasi sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi SIDAKBUD bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk pelaporan dan proses transfer dana DAK NF BOP MTB melalui aplikasi alladin;
2. Pengembangan Aplikasi Danaindonesia terkait program beasiswa menggunakan Dana Abadi Pendidikan yang bekerjasama dengan LPDP untuk pencairan anggaran kepada awardee (penambahan menu untuk pendaftaran program Beasiswa dan Magang);
3. Pengembangan Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
4. Melakukan Inovasi peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan perubahan struktur organisasi baru (Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, dan BLU Museum dan Cagar Budaya).

### 2. Penghargaan

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan memperoleh 2 yaitu:

- penghargaan berupa Unit Kerja Peringkat Ketiga dalam “Pengelolaan Sumber Daya Manusia” yang dibuktikan dengan Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68081/M/10/2023 tentang Unit Pengolah Kearsipan Terbaik Tahun 2023





penghargaan berupa Satuan Kerja Pusat Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kinerja Terbaik Tahun 2023 yang dibuktikan dengan Piagam Penghargaan Inspektur I Ijtjen Kemendikbudristek.

### 3. Program Crosscutting / Collaborative

#### 1. Bekerja sama dengan Pemerintah Republik Islam Iran dalam Program Pertukaran Budaya Tahun 2022 – 2025

Direktorat Jenderal Kebudayaan bekerja sama dalam bidang pertukaran budaya dengan tujuan memperkuat hubungan persahabatan antar negara dan ikatan budaya antara Masyarakat Iran dengan Indonesia. Atas dasar persamaan, timbal balik, dan saling menguntungkan dengan maksud untuk mempererat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Beberapa bentuk Kerjasama yang dilakukan diantaranya seperti:

## A. Budaya dan Seni

1. Menyelenggarakan acara budaya;
2. Mendorong partisipasi delegasi masing-masing dalam festival dan pertunjukan budaya Internasional dan nasional;
3. Saling bertukar pengalaman, materi informasi, publikasi, musik, foto, buku, kerajinan tangan, film, dan lukisan antara institusi budaya dan seni;
4. Bekerjasama dengan erat antar organisasi terkait di bidang arkeologi, antropologi, Sejarah, museologi, seni tradisional, arsitektur konservasi dan restorasi monumen Sejarah, arkeologi dan situs;
5. Menerjemahkan, menerbitkan dan mendistribusikan karya sastra terkenal, klasik dan karya kontemporer;
6. Memperkuat tata Kelola Lembaga kebudayaan yang mandiri melalui kegiatan kewirausahaan, pengembangan jejaring, dan/atau pemberian dana hibah.

## B. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Mendorong Kerjasama pertukaran delegasi budayawan, pakar, seniman, dan pejabat Lembaga seni budaya, melalui keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan yang diadakan oleh salah satu pihak;
2. Mendorong Kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia melalui program residensi;
3. Pertukaran bahan publikasi budaya dan seni;
4. Mendorong partisipasi masing-masing delegasi atau tenaga ahli dalam konferensi internasional, seminar ilmiah di bidang kebudayaan dan seni.

Kerjasama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran. Kerjasama ini mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya pada Indikator Kinerja:

- IKK "Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan"

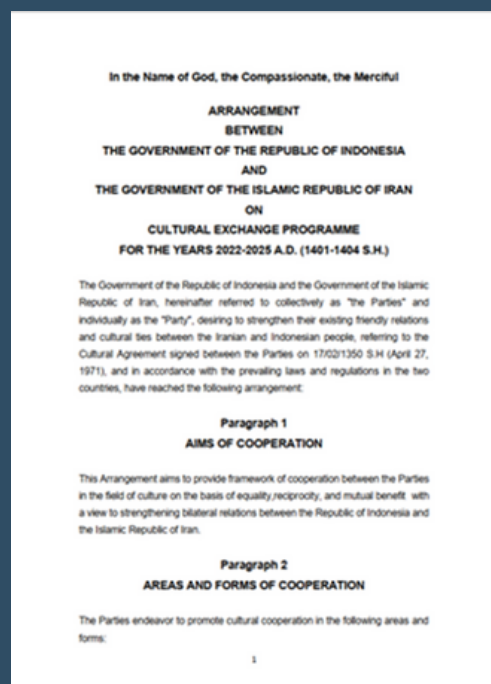
Dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Nota Kesepakatan (NK) telah disepakati poin-poin penting dalam Pertukaran Budaya sehingga dalam pelaksanaannya dapat dijalankan dengan tertib dan sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dengan begitu pemajuan kebudayaan dapat berjalan dengan terarah dan maksimal. Diharapkan dengan pertukaran budaya dapat memajukan kebudayaan di Indonesia.

2. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar dalam memajukan hubungan bilateral antara kedua negara melalui penguatan Kerjasama di bidang kebudayaan. Beberapa bentuk Kerjasama yang dilakukan diantaranya seperti:

1. Mengembangkan infrastruktur budaya dan kegiatan program untuk kaum muda;
2. Berpartisipasi dan menyelenggarakan acara budaya internasional yang diadakan di kedua negara, seperti Pekan Budaya;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan/atau kursus di bidang kebudayaan;
4. Bertukar informasi budaya dan isu-isu kepentingan bersama;
5. Mempromosikan pembangunan budaya;
6. Mendorong penerjemahan karya sastra budaya dan seni yang baru diterbitkan, ke dalam Bahasa pihak lain;
7. Mempromosikan dan memfasilitasi pameran budaya dan seni, serta pertukaran kunjungan kelompok musik, film, teater, dan seni;
8. Mempromosikan Kerjasama antara berbagai Lembaga terkait dengan sektor budaya di kedua negara.

Kerja sama tersebut diperkuat dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Qatar. Kerja sama ini mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan khususnya pada Indikator Kinerja:

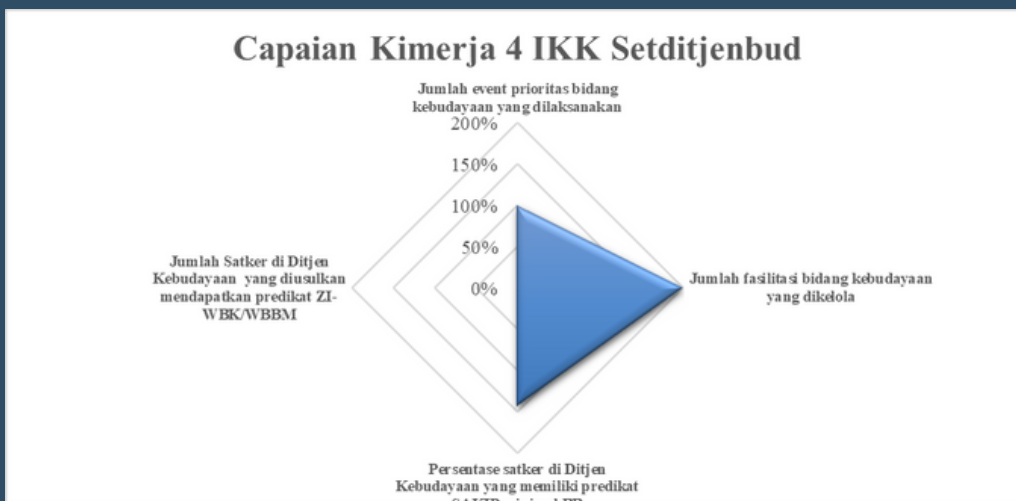
– IKK “Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan”



# BAB IV

## PENUTUP

Selama tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2023, secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil karena capaian rata-rata dari seluruh Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 110,75% dari empat indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut turut didukung oleh kinerja keuangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 423.691.022.380 atau 95,24% dari total pagu anggaran sebesar Rp 444.879.003.000.

**Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :**

1. Koordinasi secara internal maupun eksternal dengan stakeholder lainnya dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan;
2. Percepatan pengelolaan reorganisasi pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, implementasi reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, pelaksanaan tugas dan fungsi serta yang lainnya;
3. Masih terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di tahun sebelumnya yang masih perlu untuk ditindaklanjuti; dan
4. Pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.

**Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA;
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP unit kerja;
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Melakukan pendampingan kepada unit kerja/satker dalam rangka implementasi SAKIP serta penyusunan dokumen pendukungnya yang dilakukan melalui aplikasi SPASIKITA;
5. Penyelesaian reorganisasi satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup pemutakhiran informasi kinerja, penataan pegawai, dan penataan Aset BMN; dan
6. Supervisi sumber daya manusia di satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan guna peningkatan kompetensi pegawai.



# LAMPIRAN



# LAMPIRAN



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 30 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Yenny Lasmawaty

198206082009122004



**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Fitra Arda**

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3
2	[SK 2] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	70
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 197.629.164.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 278.552.393.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 476.181.557.000</b>

Jakarta,30 Januari 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**





**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Fitra Arda**

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	70
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 275.620.537.000
2	4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 169.258.466.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 444.879.003.000</b>

Jakarta, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,**



**Hilmar Farid**



**Fitra Arda**



**Rencana Aksi**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Tahun 2023**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	3	0	0	0	3
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	150	0	0	0	150
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	70	0	0	0	70
		[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10	0	0	0	10

## Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Even Prioritas Bidang Kebudayaan	3	Kegiatan	0	0	0	3	Rp. 143.950.000.000
2	[100] Pekan Kebudayaan Nasional	1	Kegiatan	0	0	0	1	Rp. 79.000.000.000
3	[101] Festival Qatar	1	Kegiatan	0	0	0	1	Rp. 54.950.000.000
4	[102] Kongres Kebudayaan Indonesia	1	kegiatan	0	0	0	1	Rp. 10.000.000.000
5	Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	Kelompok Masyarakat	0	0	0	150	Rp. 53.679.164.000
6	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	Kelompok	0	0	0	150	Rp. 53.679.164.000
7	Layanan Umum	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 105.688.169.000
8	[100] Layanan Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 34.030.302.000
9	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 28.097.957.000
10	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 10.270.502.000
11	[103] Layanan Umum, Kerjasama, dan Kehumasan	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 28.610.414.000
12	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 4.678.994.000
13	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 171.213.574.000
14	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	3	6	9	12	Rp. 154.716.453.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 16.497.121.000
16	Layanan Sarana Internal	8	Unit	0	0	0	8	Rp. 1.314.400.000
17	[995] Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	Unit	0	0	0	1	Rp. 803.950.000
18	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	Unit	0	0	0	7	Rp. 510.450.000
19	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1	1	1	1	Rp. 336.250.000
20	[052] Rehab/Renovasi Bangunan	1	unit	1	1	1	1	Rp. 336.250.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 476.181.557.000</b>

Jakarta,09 Maret 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan**



**Fitra Arda**





**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
Tahun 2023**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 1**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW1 : 0	TW1 : 0	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            - Pelaksanaan misi kebudayaan di Qatar pada National Sports Day (pencak silat) pada bulan Februari 2023 dan Qatar International Food Festival pada bulan Maret 2023; - Persiapan dan kurasi pameran budaya kopi yang akan diadakan bulan Oktober-Desember 2023; - Opening reception di Qatar pada bulan Maret 2023; - Iftar Nights Indonesia di Doha, dan Iftar Nights Qatar di Jakarta (resiprokal) pada bulan April 2023; - Produksi HAYATI yang akan dipentaskan di Doha pada bulan Mei 2023.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            - Kompleksitas koordinasi teknis dan substansi dengan para pemangku kepentingan dan mitra di Indonesia dan Qatar</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            - Mengintensifkan rapat secara daring dengan pihak-pihak di Qatar (satu minggu satu kali); - Berkoordinasi dengan KBRI Doha.</p>
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW1 : 0	TW1 : 56	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            - Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2023; - Sosialisasi Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2023; - Pembukaan periode pendaftaran Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya (FBK IB) dan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya; - Sampai akhir april sudah ada 56 penerima FBK IB yg diSK-kan dan beberapa sudah menerima dana.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            Tidak ada kendala pelaksanaan kegiatan pada triwulan I</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan timeline yang telah direncanakan</p>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW1 : 0	TW1 : 0	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>            1. penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan; 2. penyusunan Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan; 3. melaksanakan rapat evaluasi triwulan 1 atas Perjanjian Kinerja th 2023; 4. melaksanakan rapat reviu atas capaian renstra tahun 2022; 5. melaksanakan koordinasi atas perubahan pelaksanaan SAKIP karena adanya perubahan organisasi satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>            adanya misinformasi mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 bagi satuan kerja baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>            berkoordinasi dengan Biro Perencanaan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan hasil satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan tetap menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan nomenklatur eksisting, sedangkan Perjanjian Kinerja satuan kerja dengan nomenklatur baru dibuat setelah terbitnya DIPA baru.</p>

4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW1 : 0	TW1 : 0	<p><b>TW1 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b> Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam pencaangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terintialisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.</p>
---	---	--	--------	----	---------	---------	---



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN 1  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW1 : 0	TW1 : 56
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW1 : 0	TW1 : 0
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW1 : 0	TW1 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.476.181.557.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Mei 2023 sebesar **Rp. 73.181.689.582** atau **15.37%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Mei 2023 **Rp. 402.999.867.418**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan**

- IKK 1.1 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

**Progress / Kegiatan :**

- Pelaksanaan misi kebudayaan di Qatar pada National Sports Day (pencak silat) pada bulan Februari 2023 dan Qatar International Food Festival pada bulan Maret 2023
- Persiapan dan kurasi pameran budaya kopi yang akan diadakan bulan Oktober-Desember 2023
- Opening reception di Qatar pada bulan Maret 2023
- Iftar Nights Indonesia di Doha, dan Iftar Nights Qatar di Jakarta (resiprokal) pada bulan April 2023
- Produksi HAYATI yang akan dipentaskan di Doha pada bulan Mei 2023.

**Kendala / Permasalahan :**

- Kompleksitas koordinasi teknis dan substansi dengan para pemangku kepentingan dan mitra di Indonesia dan Qatar

**Strategi / Tindak Lanjut :**

- Mengintensifkan rapat secara daring dengan pihak-pihak di Qatar (satu minggu satu kali)
- Berkoordinasi dengan KBRI Doha.

**B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola**

- IKK 2.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

**Progress / Kegiatan :**

- Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan Tahun 2023
- Sosialisasi Fasilitasi Bidang Kebudayaan 2023
- Pembukaan periode pendaftaran Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya (FBK IB) dan Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya
- Sampai akhir april sudah ada 56 penerima FBK IB yg diSK-kan dan beberapa sudah menerima dana.

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada kendala pelaksanaan kegiatan pada triwulan I

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan timeline yang telah direncanakan

### C . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

- IKK 3.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

#### **Progress / Kegiatan :**

1. penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
2. penyusunan Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
3. melaksanakan rapat evaluasi triwulan 1 atas Perjanjian Kinerja th 2023
4. melaksanakan rapat revidi atas capaian renstra tahun 2022
5. melaksanakan koordinasi atas perubahan pelaksanaan SAKIP karena adanya perubahan organisasi satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

#### **Kendala / Permasalahan :**

adanya misinformasi mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 bagi satuan kerja baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

berkoordinasi dengan Biro Perencanaan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan hasil satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan tetap menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan nomenklatur eksisting, sedangkan Perjanjian Kinerja satuan kerja dengan nomenklatur baru dibuat setelah terbitnya DIPA baru.

### D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

- IKK 3.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

#### **Progress / Kegiatan :**

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat

#### **Kendala / Permasalahan :**

Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam pencaangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terintialisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.

## 3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Untuk kegiatan pendukung event prioritas bidang kebudayaan sesuai timeline sebagian besar akan dilaksanakan pada triwulan ke 3 hingga triwulan ke 4, diharapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan dapat dijalankan dengan baik dan meminimalisir kendala yang akan terjadi. Dalam event ini akan berhubungan dengan banyak stakeholder sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik.
3. melakukan percepatan buka blokir yang bersal dari tambahan PIP.
4. percepatan penerbitan dipa untuk satker baru.
2. Penyusunan juknis Fasilitasi Bidang Kebudayaan agar segera diselesaikan dan disosialisasikan.
3. Diperlukan upaya yang intensif untuk pelaksanaan SAKIP dan ZI-WBK/WBBM mengingat adanya perubahan organisasi di tingkat UPT.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Mei 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan**



**Fitra Arda**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
Tahun 2023**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 2**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW2 : 0	TW2 : 0	<p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b> pelaksanaan PKN sedang proses penyusunan kuratorial; Rapat-rapat dengan para kuratorial terkait tema, tempat pelaksanaan, jadwal dan lain-lain; Proses kurasi ke daerah - daerah terkait hasil Pekan Kebudayaan Daerah yang akan diangkat dalam PKN; Pembagian tugas dan kerja kepada masing-masing direktorat; Pencarian talent untuk pengisi acara dalam tahap kesinambungan konsep antara PKN dengan KKI; Pembahasan Rangkaian Pra KKI; Penyelarasan dengan Direktorat untuk turut Serta berperan dalam KKI; Penyusunan Tema dan Tujuan KKI serta Rencana Aksi; Penentuan Pleno; Menyusun Kebutuhan ruang yang bersifat paralel dari KKI; Sedang melakukan pembahasan dengan tim teknis untuk sesi pleno paralel.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> belum ditentukan logo dan tema penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2023; Kebutuhan ruang yang cukup banyak dan besar untuk sidang pleno KKI; survei untuk pengumpulan data dan bahan kajian outcome dan impact belum dilakukan; kelengkapan data terkait analisis dokumen PPKD kab/kota seperti dokumen RPJMD dan RKPd belum lengkap.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> akan dilaksanakan sesuai timelin; tim pra KKI 2023 berkoordinasi dengan tim PKN untuk menentukan tema dan logo yang sesuai dan sejalan dengan Pekan Kebudayaan Nasional 2023; perencanaan dan percepatan survei ke lokasi kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan dalam waktu dekat; mengumpulkan dan mencari dokumen RPJMD dan RKPd kab/kota yang belum terkumpul dari berbagai sumber.</p>
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW2 : 0	TW2 : 189	<p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b> - telah dilakukan penetapan penerima FBK dengan SK Setditjen Kebudayaan.; - sudah dilakukan pencairan untuk tahap 1 untuk 80% bagi penerima FBK.;</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> kategori FBK IB Internasional merupakan pembiayaan perjalanan bagi penerima bantuan Fasilitasi, waktu perjalanan dengan waktu disetujuinya pembiayaan (penetapan SK dan kontrak kerjasama) ada jeda beberapa waktu sehingga ada resiko perjalanan batal atau tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> pemberian biaya perjalanan dilakukan setelah terbitnya visa untuk memberikan keyakinan bahwa perjalanan tersebut akan dilaksanakan</p>



3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW2 : 0	TW2 : 0	<p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b> penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan (UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya); melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2 atas Perjanjian Kinerja th 2023; melakukan pemetaan SK dan IKK yang diampu oleh satuan kerja baru di Ditjen Kebudayaan; melaksanakan rapat perubahan rencana strategis Ditjen Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi satker baru; penyusunan dokumen perubahan renstra Ditjen Kebudayaan; penyusunan perubahan definisi operasional atas renstra Ditjen Kebudayaan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> terdapat beberapa kendala teknis pada menu pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA khususnya terkait penggunaan akun KPA yang merupakan fitur baru; belum terpetakannya SK dan IKK satker baru di aplikasi spasikita dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan data pemetaan SK dan IKK tersebut; terdapat beberapa kendala teknis pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja Satker baru di aplikasi SPASIKITA, khususnya pada akun satuan kerja baru (belum ada akun satker sebelumnya); berubahnya SDM tim operator di beberapa satker yang belum memahami implementasi SAKIP dan penggunaan aplikasi SPASIKITA.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro perencanaan dan tim pengembang SPASIKITA terkait kendala-kendala teknis pada aplikasi; mengirimkan data pemetaan SK dan IKK satker baru kepada Biro Perencanaan untuk digunakan sebagai acuan database di aplikasi SPASIKITA; melakukan asistensi dan selalu berkoordinasi dengan operator baru terkait implementasi SAKIP termasuk dalam pemanfaatan aplikasi SPASIKITA.</p>
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW2 : 0	TW2 : 0	<p><b>TW2 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b> Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam penancangan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terinternalisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.</p>

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 2	Anggaran
1	<b>Even Prioritas Bidang Kebudayaan</b>	<b>3</b>	<b>Kegiatan</b>	0	<b>Rp. 120.179.302.000</b>
2	[100] Pekan Kebudayaan Nasional	1	kegiatan	0	Rp. 89.905.113.000
3	[101] Festival Qatar	1	kegiatan	0	Rp. 14.852.039.000
4	[102] Kongres Kebudayaan Indonesia	1	kegiatan	0	Rp. 15.422.150.000
5	<b>Fasilitasi Bidang Kebudayaan</b>	<b>150</b>	<b>Kelompok Masyarakat</b>	81	<b>Rp. 49.079.164.000</b>
6	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	kelompok	81	Rp. 49.079.164.000
7	<b>Layanan Umum</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 105.688.169.000</b>
8	[100] Layanan Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	1	layanan	1	Rp. 37.052.255.000
9	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 25.771.923.000
10	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN	1	layanan	1	Rp. 9.316.072.000
11	[103] Layanan Umum, Kerjasama, dan Kehumasan	1	layanan	1	Rp. 28.567.725.000
12	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 4.980.194.000
13	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 168.281.718.000</b>
14	[001] Gaji dan Tunjangan	12	layanan	6	Rp. 149.883.797.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	layanan	1	Rp. 18.397.921.000
16	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>8</b>	<b>Unit</b>	0	<b>Rp. 1.314.400.000</b>
17	[995] Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	unit	0	Rp. 910.000.000
18	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	unit	0	Rp. 355.000.000
19	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	unit	0	Rp. 49.400.000
20	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	0	<b>Rp. 336.250.000</b>
21	[052] Rehab/Renovasi Bangunan	1	unit	0	Rp. 336.250.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>					<b>Rp. 444.879.003.000</b>



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN II  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN s.d Bulan Juli Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW2 : 0	TW2 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW2 : 0	TW2 : 189
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW2 : 0	TW2 : 0
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW2 : 0	TW2 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.445.831.275.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 24 Juli 2023 sebesar **Rp. 146.938.852.317** atau **32.96%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 24 Juli 2023 **Rp. 298.892.422.683**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan**

- IKK 1.1 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

**Progress / Kegiatan :**

pelaksanaan PKN sedang proses penyusunan kuratorial  
Rapat-rapat dengan para kuratorial terkait tema, tempat pelaksanaan, jadwal dan lain-lain  
Proses kurasi ke daerah - daerah terkait hasil Pekan Kebudayaan Daerah yang akan diangkat dalam PKN  
Pembagian tugas dan kerja kepada masing-masing direktorat  
Pencarian talent untuk pengisi acara dalam tahap kesinambungan konsep antara PKN dengan KKI  
Pembahasan Rangkaian Pra KKI  
Penyelarasan dengan Direktorat untuk turut Serta berperan dalam KKI  
Penyusunan Tema dan Tujuan KKI serta Rencana Aksi  
Penentuan Pleno  
Menyusun Kebutuhan ruang yang bersifat paralel dari KKI  
Sedang melakukan pembahasan dengan tim teknis untuk sesi pleno paralel.

**Kendala / Permasalahan :**

belum ditentukan logo dan tema penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2023  
Kebutuhan ruang yang cukup banyak dan besar untuk sidang pleno KKI  
survei untuk pengumpulan data dan bahan kajian outcome dan impact belum dilakukan  
kelengkapan data terkait analisis dokumen PPKD kab/kota seperti dokumen RPJMD dan RKPD belum lengkap.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

akan dilaksanakan sesuai timelin  
tim pra KKI 2023 berkoordinasi dengan tim PKN untuk menentukan tema dan logo yang sesuai dan sejalan dengan Pekan Kebudayaan Nasional 2023  
perencanaan dan percepatan survei ke lokasi kegiatan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Kebudayaan dalam waktu dekat  
mengumpulkan dan mencari dokumen RPJMD dan RKPD kab/kota yang belum terkumpul dari berbagai sumber.

**B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola**

- IKK 2.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Progress / Kegiatan :**

- telah dilakukan penetapan penerima FBK dengan SK Setditjen Kebudayaan.
- sudah dilakukan pencairan untuk tahap 1 untuk 80% bagi penerima FBK.

**Kendala / Permasalahan :**

kategori FBK IB Internasional merupakan pembiayaan perjalanan bagi penerima bantuan Fasilitas, waktu perjalanan dengan waktu disetujuinya pembiayaan (penetapan SK dan kontrak kerjasama) ada jeda beberapa waktu sehingga ada resiko perjalanan batal atau tidak dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

pemberian biaya perjalanan dilakukan setelah terbitnya visa untuk memberikan keyakinan bahwa perjalanan tersebut akan dilaksanakan

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

**Progress / Kegiatan :**

penyusunan Perjanjian Kinerja pimpinan satker baru di lingkungan Ditjen Kebudayaan (UPT Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya)

melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2 atas Perjanjian Kinerja th 2023

melakukan pemetaan SK dan IKK yang diampu oleh satuan kerja baru di Ditjen Kebudayaan

melaksanakan rapat perubahan rencana strategis Ditjen Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi satker baru

penyusunan dokumen perubahan renstra Ditjen Kebudayaan

penyusunan perubahan definisi operasional atas renstra Ditjen Kebudayaan.

**Kendala / Permasalahan :**

terdapat beberapa kendala teknis pada menu pengukuran kinerja di aplikasi SPASIKITA khususnya terkait penggunaan akun KPA yang merupakan fitur baru

belum terpetakannya SK dan IKK satker baru di aplikasi spasikita dan membutuhkan waktu yang lebih untuk menyiapkan data pemetaan SK dan IKK tersebut

terdapat beberapa kendala teknis pada proses penyusunan Perjanjian Kinerja Satker baru di aplikasi SPASIKITA, khususnya pada akun satuan kerja baru (belum ada akun satker sebelumnya)

ubahannya SDM tim operator di beberapa satker yang belum memahami implementasi SAKIP dan penggunaan aplikasi SPASIKITA.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro perencanaan dan tim pengembang SPASIKITA terkait kendala-kendala teknis pada aplikasi

mengirimkan data pemetaan SK dan IKK satker baru kepada Biro Perencanaan untuk digunakan sebagai acuan database di aplikasi SPASIKITA

melakukan asistensi dan selalu berkoordinasi dengan operator baru terkait implementasi SAKIP termasuk dalam pemanfaatan aplikasi SPASIKITA.

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Kebudayaan dan Pemantauan Layanan Masyarakat

**Kendala / Permasalahan :**

Penataan organisasi pada UPT Ditjen Kebudayaan menjadi kendala dalam pencairan pelaksanaan ZI-WBK/WBBM karena belum dapat dilakukannya pelayanan dengan mengikuti perubahan proses bisnis sesuai rincian tugas dan fungsinya.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) agar informasi Reformasi Birokrasi terinternalisasi kepada seluruh pegawai khususnya pada satuan kerja/UPT baru.

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. percepatan pelaksanaan kegiatan untuk FBK dan kegiatan teknis
2. penyusunan timeline kegiatan
3. rapat evaluasi kegiatan setiap bulan dengan para tim kegiatan
4. rapat perencanaan kegiatan
5. Melakukan penginputan simproka dan sakti sesuai pelaksanaan
6. Melakukan Percepatan UP dan TUP
7. segera dilakukan rapat koordinasi terkait PKN, KKI dan kegiatan event lainnya
8. Percepatan belanja modal untuk Setditjen kebudayaan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

9. Percepatan Revisi Lepas blokir untuk anggaran setditjen kebudayaan

10. PEncairan tahap 2 untuk kegiatan FBK.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 24 Juli 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan**



**Fitra Arda**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
Tahun 2023**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 3**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW3 : 0	TW3 : 0	<p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>- Telah dilakukan kegiatan pra KKI, diantaranya: analisis capaian kabupaten/kota dengan strategi kebudayaan melalui PPKD dan kelengkapan lainnya, analisis capaian provinsi melalui sandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Indeks-indeks lainnya, analisis outcome program Prioritas Ditjen Kebudayaan, kegiatan pra KKI oleh Koalisi Seni Indonesia, kegiatan sidang komisi Tata Kelola Pelibatan Masyarakat dalam {erencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Organisasi masyarakat Bidang Kebudayaan, dan tata kelola pendidikan kesenian dan kebudayaan; - Indie Indonesia Film Series bersama Doha Film Institute pada tanggal 31 Agustus s.d 2 September di Museum of Islamic Arts, bersama dengan Doha Film Institute bekerja sama dengan Madani Film Fest dan Jogja Netpac Asia Film Festival; - Residensi Dialogue of Papers oleh seniman Indonesia dan Qatar di Doha, pada tanggal 16 Agustus s.d. 1 September; - Program aktivasi buku dan kampanye literasi di Doha pada 21-22 Agustus dan di Jakarta pada 9-13 September, bersama dengan Qatar National Library dan Forum Taman Bacaan Masyarakat DKI Jakarta; - Indonesian Culture Workshop Month bersama Qatar Museum di bulan September, dengan jadwal sbb: Wayang Suket (Minggu 1), Batik (Minggu 2), Gerabah (Minggu 3), dan Tari Merak (Minggu 4). - Workshop Angklung dan Tari untuk komunitas-komunitas diaspora Indonesia di Qatar selama 1 bulan, mulai 16 September hingga 15 Oktober.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>belum terkoordinasi secara keseluruhan pembagian tugas masing-masing bidang</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>menjelang KKI diadakan rapat secara intensif dan membahas teknis persiapan, pra KKI, hingga teknis pelaksanaan secara lebih mendetail</p>
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW3 : 0	TW3 : 189	<p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>Pencairan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya dan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>Tidak ada kendala dan permasalahan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>tidak ada tindak lanjut dan strategi karena tidak ada permasalahan</p>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW3 : 0	TW3 : 0	<p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>- melakukan rapat evaluasi triwulan III terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023; - melakukan evaluasi mandiri AKIP; - evaluasi pengukuran Triwulan III terhadap satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan; - pendampingan penyusunan evaluasi mandiri AKIP.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>Tidak ada permasalahan</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>Tidak ada tindak lanjut</p>
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW3 : 0	TW3 : 0	<p><b>TW3 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>Menunggu jadwal wawancara TIM Penilai Nasional.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>Karena adanya Penataan Organisasi pada Ditjen kebudayaan maka TIM Penilai Internal membatalkan pengajuan Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>1. Akan diadakan sosialisasi untuk satuan kerja yang akan dicalonkan sebagai Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM hasil dari adanya penataan organisasi; 2. Adanya 3 orang pegawai setditjen yang mengikuti pelatihan asesor RBI.</p>



**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 3	Anggaran
1	<b>Even Prioritas Bidang Kebudayaan</b>	<b>3</b>	<b>Kegiatan</b>	0	<b>Rp. 120.179.302.000</b>
2	[100] Pekan Kebudayaan Nasional	1	kegiatan	0	Rp. 89.905.113.000
3	[101] Festival Qatar	1	kegiatan	0	Rp. 14.852.039.000
4	[102] Kongres Kebudayaan Indonesia	1	kegiatan	0	Rp. 15.422.150.000
5	<b>Fasilitasi Bidang Kebudayaan</b>	<b>150</b>	<b>Kelompok Masyarakat</b>	177	<b>Rp. 49.079.164.000</b>
6	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	kelompok	177	Rp. 49.079.164.000
7	<b>Layanan Umum</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 105.688.169.000</b>
8	[100] Layanan Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	1	layanan	1	Rp. 37.052.255.000
9	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 25.771.923.000
10	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN	1	layanan	1	Rp. 9.316.072.000
11	[103] Layanan Umum, Kerjasama, dan Kehumasan	1	layanan	1	Rp. 28.567.725.000
12	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 4.980.194.000
13	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 168.281.718.000</b>
14	[001] Gaji dan Tunjangan	12	layanan	9	Rp. 149.883.797.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	layanan	1	Rp. 18.397.921.000
16	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>8</b>	<b>Unit</b>	7	<b>Rp. 1.314.400.000</b>
17	[995] Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	unit	0	Rp. 910.000.000
18	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	unit	7	Rp. 355.000.000
19	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	unit	0	Rp. 49.400.000
20	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	0	<b>Rp. 336.250.000</b>
21	[052] Rehab/Renovasi Bangunan	1	unit	0	Rp. 336.250.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>					<b>Rp. 444.879.003.000</b>



**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN III  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN s.d Bulan Oktober Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW3 : 0	TW3 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	TW3 : 0	TW3 : 189
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	TW3 : 0	TW3 : 0
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	TW3 : 0	TW3 : 0

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.446.448.197.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Oktober 2023 sebesar **Rp. 259.784.030.660** atau **58.19%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 31 Oktober 2023 **Rp. 186.664.166.340**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan**

- IKK 1.1 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

**Progress / Kegiatan :**

- Telah dilakukan kegiatan pra KKI, diantaranya: analisis capaian kabupaten/kota dengan strategi kebudayaan melalui PPKD dan kelengkapan lainnya, analisis capaian provinsi melalui sandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Indeks-indeks lainnya, analisis outcome program Prioritas Ditjen Kebudayaan, kegiatan pra KKI oleh Koalisi Seni Indonesia, kegiatan sidang komisi Tata Kelola Pelibatan Masyarakat dalam {rencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Organisasi masyarakat Bidang Kebudayaan, dan tata kelola pendidikan kesenian dan kebudayaan
- Indie Indonesia Film Series bersama Doha Film Institute pada tanggal 31 Agustus s.d 2 September di Museum of Islamic Arts, bersama dengan Doha Film Institute bekerja sama dengan Madani Film Fest dan Jogja Netpac Asia Film Festival
- Residensi Dialogue of Papers oleh seniman Indonesia dan Qatar di Doha, pada tanggal 16 Agustus s.d. 1 September
- Program aktivasi buku dan kampanye literasi di Doha pada 21-22 Agustus dan di Jakarta pada 9-13 September, bersama dengan Qatar National Library dan Forum Taman Bacaan Masyarakat DKI Jakarta
- Indonesian Culture Workshop Month bersama Qatar Museum di bulan September, dengan jadwal sbb: Wayang Suket (Minggu 1), Batik (Minggu 2), Gerabah (Minggu 3), dan Tari Merak (Minggu 4). - Workshop Angklung dan Tari untuk komunitas-komunitas diaspora Indonesia di Qatar selama 1 bulan, mulai 16 September hingga 15 Oktober.

**Kendala / Permasalahan :**

belum terkoordinasi secara keseluruhan pembagian tugas masing-masing bidang

**Strategi / Tindak Lanjut :**

menjelang KKI diadakan rapat secara intensif dan membahas teknis persiapan, pra KKI, hingga teknis pelaksanaan secara lebih mendetail

**B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola**

- IKK 2.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

**Progress / Kegiatan :**

Pencairan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Interaksi Budaya dan Fasilitasi Bidang Kebudayaan Stimulan

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada kendala dan permasalahan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

tidak ada tindak lanjut dan strategi karena tidak ada permasalahan

**C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

**Progress / Kegiatan :**

- melakukan rapat evaluasi triwulan III terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023
- melakukan evaluasi mandiri AKIP
- evaluasi pengukuran Triwulan III terhadap satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan
- pendampingan penyusunan evaluasi mandiri AKIP.

**Kendala / Permasalahan :**

Tidak ada permasalahan

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Tidak ada tindak lanjut

**D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Menunggu jadwal wawancara TIM Penilai Nasional.

**Kendala / Permasalahan :**

Karena adanya Penataan Organisasi pada Ditjen kebudayaan maka TIM Penilai Internal membatalkan pengajuan Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM

**Strategi / Tindak Lanjut :**

1. Akan diadakan sosialisasi untuk satuan kerja yang akan dicalonkan sebagai Satuan Kerja predikat ZI-WBK/WBBM hasil dari adanya penataan organisasi
2. Adanya 3 orang pegawai setditjen yang mengikuti pelatihan asesor RBI.

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Melakukan percepatan untuk seluruh kegiatan yang belum dijalankan hingga TW 3 berakhir dengan mempertimbangkan linimasa kegiatan yang sudah dimutakhirkan
2. Melakukan rapat-rapat yang berorientasi terhadap percepatan dan mencari solusi dengan tetap memegang prinsip efektif, efisien, dan akuntabel
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang dan pokja di lingkungan Setditjen Kebudayaan agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan optimal
4. Optimalisasi penyerapan anggaran dan kinerja SDM di lingkungan Setditjen Kebudayaan
5. Meningkatkan komunikasi antar pegawai dan pelaporan terhadap permasalahan sehingga dapat cepat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan III tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 31 Oktober 2023

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan**



**Fitra Arda**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
**Tahun 2023**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan TW 4**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	TW4 : 3	TW4 : 3	<p><b>TW4 :</b></p> <p><b>Progress / Kegiatan :</b></p> <p>- Pelaksanaan proses panen, rawat, dan bagi masing-masing kuratorial PKN di berbagai daerah; - Puncak perayaan PKN dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 29 Oktober 2023; - Ruang Tamu PKN tersebar di kota Jakarta dan sekitarnya dengan 40 titik; - Pembukaan PKN Tahun 2023 dilaksanakan di Galeri Nasional Indonesia sebagai ruang tamu utama yang terbuka untuk umum, dan undangan khusus; - Selain Galeri Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional dan Perum Produksi Film Negara (PFN) menjadi ruang tamu utama PKN; - Pawai dengan konsep Lumbung Sungai, parade rakit hias, dilaksanakan di Banjir Kanal Timur pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagai rangkaian penutup kegiatan PKN Tahun 2023; - Ruang Tamu PKN di Bappenas menghasilkan rekomendasi kebijakan Kawasan Pemajuan Kebudayaan; Telah dilakukan kegiatan KKI yang menghasilkan 10 Maklumat kebudayaan sebagai daya transformasi Keindonesiaan: 1. Kebudayaan sebagai daya utama dalam transformasi ke-Indonesiaan merupakan hasil kesepakatan yang terus menerus berproses untuk mengolah dan mengembangkan keanekaragaman dan kekayaan hayati dan budaya dalam mengarungi perubahan global yang multi-dimensi; 2. 2024-2029 merupakan babak penting dalam meletakkan pemajuan kebudayaan sebagai kebutuhan dasar publik, dan sekaligus panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi, melalui tata kelola yang sehat, dan kerja para pelaku dan pandu-pandu budaya pada berbagai bidang, tingkatan dan sektor. Visi Indonesia 2045 mempersyaratkan terbentuknya pandu-pandu yang berbudi-daya dan berdaya-budi pada babak ini; 3. Kebebasan berekspresi membuka ruang yang nyaman dan aman, inovasi cara-cara baru dan kreativitas merupakan landasan pemajuan kebudayaan, yang perlu didukung oleh platform ekonomi budaya agar berkembang secara organik dan berkelanjutan; 4. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan sekolah kehidupan, yang mengembangkan kemampuan belajar untuk menghidupi keanekaragaman dan kekayaan budaya, kecakapan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekologi, serta sikap merdeka yang berintegritas. Pengembangan sumberdaya insani dan teknologi untuk menjadi penggerak di bidang kebudayaan adalah kunci ketangguhan Indonesia di masa depan, yang perlu difasilitasi dan didukung secara terintegrasi dan lintas sektoral oleh semua pemangku kepentingan; 5. Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem pemajuan kebudayaan. Musyawarah Kesenian Nasional menjadi platform bagi para seniman untuk hadir dan tampil berperan secara lebih dinamis dan terukur. Taman budaya, museum, galeri dan kawasan warisan budaya dikembangkan sebagai bentuk-bentuk layanan umum yang dapat diakses publik secara berkelanjutan; 6. Perjumpaan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif direkatkan melalui platform Pekan Kebudayaan Nasional. Perhelatan digerakkan oleh cara kerja pe-lumbung-an (commoning) dan pengorganisasian kolektif secara organik untuk berbagai sumberdaya dari proses semai, tanam, panen, hingga simpan, kumpul dan bagi di tataran lokal serta jalinan antar komunitas global. Indonesia menghadirkan kembali Bandung Spirit melalui kerjasama kreatif dan diplomasi budaya; 7. Pemanfaatan teknologi digital merupakan keniscayaan untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat. Kecerdasan buatan dioptimalkan untuk memutakhirkan warisan budaya dan inspirasi para maestro, empu-empu teknologi tradisional dalam proses regenerasi, transfer ilmu, dan inovasi. Di lain pihak, gangguan kesehatan mental dan perilaku negatif sebagai akibat dari konsumsi imaji dan budaya layar (screen culture) dari teknologi digital akan semakin membanyak, dan memerlukan cara-cara baru penanggulangan dan pencegahannya; 8. Masyarakat adat dan lokal lainnya adalah subjek yang berdaulat atas wilayah, sumber daya alam, dan sumber pengetahuan budaya, serta merupakan pengusung keanekaragaman budaya dan hayati. Keanekaragaman budaya dan hayati juga adalah modal bagi pengelolaan pariwisata ekologis, Program Sirkuit Perjumpaan Budaya, dan Lawatan Widyawisata yang terpadu, serta sarana-sarana lain untuk pengembangan rasa cinta Tanah Air; 9. Indonesia memerlukan suatu badan amatan pemajuan kebudayaan (Cultural Observatory) yang memantau, mengkaji perubahan budaya, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan holistik, trans- dan multi-disiplin; 10. Model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan, termasuk sistem perpajakan dan insentif yang mendorong pemajuan kebudayaan. Pelayanan pemerintah di bidang kebudayaan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara mekanis-birokratis, dan dilaksanakan dengan penuh pelibatan dan partisipasi masyarakat yang penuh dan bermakna, dengan pemahaman atas narasi kebudayaan, dan imajinasi-imajinasi kreatif para pelaku dan pandu budaya. Keberadaan dana kebudayaan pada tingkat nasional telah mendorong kegairahan pegiat budaya untuk berkarya, berinteraksi dan berpartisipasi. Akses terhadap dana kebudayaan perlu diperluas ke seluruh wilayah Nusantara secara adil untuk menguatkan ekosistem kebudayaan dengan tata-kelola yang transparan dan akuntabel; - Madani Film Festival di Jakarta, Indonesia yang menampilkan lima film yang berafiliasi dengan Qatar, pada tanggal 7 hingga 12 Oktober; - Photography Exchange Journey di Surakarta, Jawa Tengah, 16 hingga 21 Oktober; - Pameran Growing Kopi, Drinking Qahwa: Stories of Coffee from Qatar and Indonesia di National Museum of Qatar, 23 Oktober 2023 hingga 17 Februari 2024; - Coffee in Batik, Batik in Coffee di Doha, 26-27 Oktober 2023; - Pameran Arabic Script in Indonesia di Qatar National Library, 1 November 2023 hingga 25 April 2024; - Culture Beyond Books, program publik di Qatar National Library, 2-5 November; - Kopi Experience – Eastern Indonesia di Café999 Fire Station Gallery Doha, 23 s.d. 25 November; - Pameran "Dialogue of Papers" di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 25 November s.d. 16 Desember; - Pameran "Capturing Echoes: A Photographic Journey" di Galeri Cemara 6, Jakarta 1 s.d. 20 Desember dengan diskusi publik pada tanggal 3 dan 16 Desember; - Penayangan film-film Indonesia oleh Doha Film Institute dalam rangkaian "Indonesia Through the Lens" di Museum of Islamic Arts, 7 s.d. 12 Desember; - Kopi Experience – Sumatera di Flat White Café, Iconic, 10 Desember.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b></p> <p>Kegiatan "Festival Indonesia" di Doha dibatalkan sesuai dengan keputusan bersama oleh Qatar dan Indonesia dikarenakan oleh solidaritas pada masyarakat Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Pembatalan ini berdampak pada beberapa hal teknis dan administratif yang sebetulnya telah disiapkan sejak jauh-jauh hari.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak Qatar Museums, KBRI Doha, dan Kedutaan Besar Qatar di Jakarta untuk tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-festival dan non-selebrasi di Qatar pada bulan November dan Desember.</p>

2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	<b>TW4</b> : 150	<b>TW4</b> : 300	<b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> - pembuatan SP2B FBK Stimulan sebanyak 27 SP2B yg sdh di nyatakan LULUS tahap akhir karena sudah galang dana Publik 25 jt; - Melakukan Zoom Meeting Pelaporan dan perpajakan FBK Stimulan oleh Bendahara Setditejnbud dengan Penerima Dana FBK Stimulan Setiap Sebelum pemberian SP2B ke penerima dana FBK Stimulan 2023. <b>Kendala / Permasalahan :</b> - Banyak linimasa FBK Stimulan yg kegiatannya terlalu mepet kegiatannya sebelum pencairan SP2B; - masih Kurang pemahamannya Para Penerima dana FBK Stimulan tentang Perpajakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Menghimbau kepada Para Pengusul Untuk memahami tahapan-tahapan mengenai Pencairan bantuan pemerintah khususnya FBK Stimulan agar tidak ada revisi linimasa yg bisa menghambat kegiatan yg mereka usulkan.
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	<b>TW4</b> : 70	<b>TW4</b> : 100	<b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> - melakukan rapat evaluasi triwulan III dan IV terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023; - melakukan pengukuran kinerja Triwulan III dan IV; - pendampingan penginputan pengukuran kinerja kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan; - menyusun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023; - pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan revisi Perjanjian Kinerja satuan kerja Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Kebudayaan. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Terdapat beberapa kendala pada aplikasi SPASIKITA seperti menu input capaian IKK yang tidak muncul, tidak bisa mengisi rekomendasi pimpinan, perbedaan jumlah pagu anggaran, dll <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi Biro Perencanaan terkait kendala teknis yang ada.
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	<b>TW4</b> : 10	<b>TW4</b> : 0	<b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Adanya temuan Inspektorat Jenderal bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan harus membuat Proses Bisnis berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan pada pasal 13 huruf a. <b>Kendala / Permasalahan :</b> Belum tersusunnya Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 4	Anggaran
1	<b>Even Prioritas Bidang Kebudayaan</b>	<b>3</b>	<b>Kegiatan</b>	3	<b>Rp. 120.179.302.000</b>
2	[100] Pekan Kebudayaan Nasional	1	kegiatan	1	Rp. 89.905.113.000
3	[101] Festival Qatar	1	kegiatan	1	Rp. 14.852.039.000
4	[102] Kongres Kebudayaan Indonesia	1	kegiatan	1	Rp. 15.422.150.000
5	<b>Fasilitasi Bidang Kebudayaan</b>	<b>150</b>	<b>Kelompok Masyarakat</b>	300	<b>Rp. 49.079.164.000</b>
6	[100] Fasilitasi Bidang Kebudayaan	150	kelompok	300	Rp. 49.079.164.000
7	<b>Layanan Umum</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 105.688.169.000</b>
8	[100] Layanan Bidang Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian	1	layanan	1	Rp. 37.052.255.000
9	[101] Layanan Perencanaan dan Evaluasi Program Direktorat Jenderal Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 25.771.923.000
10	[102] Layanan Bidang Keuangan dan BMN	1	layanan	1	Rp. 9.316.072.000
11	[103] Layanan Umum, Kerjasama, dan Kehumasan	1	layanan	1	Rp. 28.567.725.000
12	[104] Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	1	layanan	1	Rp. 4.980.194.000
13	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>Layanan</b>	1	<b>Rp. 168.281.718.000</b>
14	[001] Gaji dan Tunjangan	12	layanan	12	Rp. 149.883.797.000
15	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	layanan	1	Rp. 18.397.921.000
16	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>8</b>	<b>Unit</b>	14	<b>Rp. 1.314.400.000</b>
17	[995] Pengadaan Kendaraan Bermotor	1	unit	1	Rp. 910.000.000
18	[996] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	unit	7	Rp. 355.000.000
19	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	unit	4	Rp. 49.400.000
20	<b>Layanan Prasarana Internal</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	1	<b>Rp. 336.250.000</b>
21	[052] Rehab/Renovasi Bangunan	1	unit	1	Rp. 336.250.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>					<b>Rp. 444.879.003.000</b>





**LAPORAN KINERJA  
TRIWULAN IV  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	[IKK 1.1] Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan/Event	3	<b>TW4 : 3</b>	<b>TW4 : 3</b>
2	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 2.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	150	<b>TW4 : 150</b>	<b>TW4 : 300</b>
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.1] Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	70	<b>TW4 : 70</b>	<b>TW4 : 100</b>
4	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 3.2] Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10	<b>TW4 : 10</b>	<b>TW4 : 0</b>

**2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV**

**a). PENYERAPAN ANGGARAN**

Pagu Anggaran sebesar **Rp.444.879.003.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 423.567.849.580** atau **95,21%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 21.311.153.420**

**b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN**

**A . SK 1.0 Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan**

- IKK 1.1 Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan

**Progress / Kegiatan :**

- Pelaksanaan proses panen, rawat, dan bagi masing-masing kuratorial PKN di berbagai daerah
  - Puncak perayaan PKN dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 29 Oktober 2023
  - Ruang Tamu PKN tersebar di kota Jakarta dan sekitarnya dengan 40 titik
  - Pembukaan PKN Tahun 2023 dilaksanakan di Galeri Nasional Indonesia sebagai ruang tamu utama yang terbuka untuk umum, dan undangan khusus
  - Selain Galeri Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional dan Perum Produksi Film Negara (PFN) menjadi ruang tamu utama PKN
  - Pawai dengan konsep Lumbung Sungai, parade rakit hias, dilaksanakan di Banjir Kanal Timur pada tanggal 29 Oktober 2023 sebagai rangkaian penutup kegiatan PKN Tahun 2023
  - Ruang Tamu PKN di Bappenas menghasilkan rekomendasi kebijakan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
- Telah dilakukan kegiatan KKI yang menghasilkan 10 Maklumat kebudayaan sebagai daya transformasi Keindonesiaan: 1. Kebudayaan sebagai daya utama dalam transformasi ke-Indonesiaan merupakan hasil kesepakatan yang terus menerus berproses untuk mengolah dan mengembangkan keanekaragaman dan kekayaan hayati dan budaya dalam mengarungi perubahan global yang multi-dimensi
2. 2024-2029 merupakan babak penting dalam meletakkan pemajuan kebudayaan sebagai kebutuhan dasar publik, dan sekaligus panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi, melalui tata kelola yang sehat, dan kerja para pelaku dan pandu-pandu budaya pada berbagai bidang, tingkatan dan sektor. Visi Indonesia 2045 mempersyaratkan terbentuknya pandu-pandu yang berbudi-daya dan berdaya-budi pada babak ini
3. Kebebasan berekspresi membuka ruang yang nyaman dan aman, inovasi cara-cara baru dan kreativitas merupakan landasan pemajuan kebudayaan, yang perlu didukung oleh platform ekonomi budaya agar berkembang secara organik dan berkelanjutan
4. Pendidikan yang berkebudayaan merupakan sekolah kehidupan, yang mengembangkan kemampuan belajar untuk menghidupi keanekaragaman dan kekayaan budaya, kecakapan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekologi, serta sikap merdeka yang berintegritas. Pengembangan sumberdaya insani dan teknologi untuk menjadi penggerak di bidang kebudayaan adalah kunci ketangguhan Indonesia di masa depan, yang perlu difasilitasi dan didukung secara terintegrasi dan lintas sektoral oleh semua pemangku kepentingan
5. Transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun ekosistem

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

pemajuan kebudayaan. Musyawarah Kesenian Nasional menjadi platform bagi para seniman untuk hadir dan tampil berperan secara lebih dinamis dan terukur. Taman budaya, museum, galeri dan kawasan warisan budaya dikembangkan sebagai bentuk-bentuk layanan umum yang dapat diakses publik secara berkelanjutan

6. Perjumpaan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif direkatkan melalui platform Pekan Kebudayaan Nasional. Perhelatan digerakkan oleh cara kerja pe-lumbung-an (commoning) dan pengorganisasian kolektif secara organik untuk berbagi sumberdaya dari proses semai, tanam, panen, hingga simpan, kumpul dan bagi di tataran lokal serta jalinan antar komunitas global. Indonesia menghadirkan kembali Bandung Spirit melalui kerjasama kreatif dan diplomasi budaya

7. Pemanfaatan teknologi digital merupakan keniscayaan untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesia, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat. Kecerdasan buatan dioptimalkan untuk memutakhirkan warisan budaya dan inspirasi para maestro, empu-empu teknologi tradisional dalam proses regenerasi, transfer ilmu, dan inovasi. Di lain pihak, gangguan kesehatan mental dan perilaku negatif sebagai akibat dari konsumsi imaji dan budaya layar (screen culture) dari teknologi digital akan semakin membanyak, dan memerlukan cara-cara baru penanggulangan dan pencegahannya

8. Masyarakat adat dan lokal lainnya adalah subjek yang berdaulat atas wilayah, sumber daya alam, dan sumber pengetahuan budaya, serta merupakan pengusung keanekaragaman budaya dan hayati. Keanekaragaman budaya dan hayati juga adalah modal bagi pengelolaan pariwisata ekologis, Program Sirkuit Perjumpaan Budaya, dan Lawatan Widyawisata yang terpadu, serta sarana-sarana lain untuk pengembangan rasa cinta Tanah Air

9. Indonesia memerlukan suatu badan amatan pemajuan kebudayaan (Cultural Observatory) yang memantau, mengkaji perubahan budaya, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan holistik, trans- dan multi-disiplin

10. Model APBN/D diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan, termasuk sistem perpajakan dan insentif yang mendorong pemajuan kebudayaan. Pelayanan pemerintah di bidang kebudayaan kepada masyarakat tidak dilakukan secara mekanis-birokratis, dan dilaksanakan dengan penuh pelibatan dan partisipasi masyarakat yang penuh dan bermakna, dengan pemahaman atas narasi kebudayaan, dan imajinasi-imajinasi kreatif para pelaku dan pandu budaya. Keberadaan dana kebudayaan pada tingkat nasional telah mendorong kegairahan pegiat budaya untuk berkarya, berinteraksi dan berpartisipasi. Akses terhadap dana kebudayaan perlu diperluas ke seluruh wilayah Nusantara secara adil untuk menguatkan ekosistem kebudayaan dengan tata-kelola yang transparan dan akuntabel

- Madani Film Festival di Jakarta, Indonesia yang menampilkan lima film yang berafiliasi dengan Qatar, pada tanggal 7 hingga 12 Oktober

- Photography Exchange Journey di Surakarta, Jawa Tengah, 16 hingga 21 Oktober

- Pameran Growing Kopi, Drinking Qahwa: Stories of Coffee from Qatar and Indonesia di National Museum of Qatar, 23 Oktober 2023 hingga 17 Februari 2024

- Coffee in Batik, Batik in Coffee di Doha, 26-27 Oktober 2023

- Pameran Arabic Script in Indonesia di Qatar National Library, 1 November 2023 hingga 25 April 2024

- Culture Beyond Books, program publik di Qatar National Library, 2-5 November

- Kopi Experience - Eastern Indonesia di Café999 Fire Station Gallery Doha, 23 s.d. 25 November

- Pameran "Dialogue of Papers" di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 25 November s.d. 16 Desember

- Pameran "Capturing Echoes: A Photographic Journey" di Galeri Cemara 6, Jakarta 1 s.d. 20 Desember dengan diskusi publik pada tanggal 3 dan 16 Desember

- Penayangan film-film Indonesia oleh Doha Film Institute dalam rangkaian "Indonesia Through the Lens" di Museum of Islamic Arts, 7 s.d. 12 Desember

- Kopi Experience - Sumatera di Flat White Café, Iconic, 10 Desember.

#### **Kendala / Permasalahan :**

Kegiatan "Festival Indonesia" di Doha dibatalkan sesuai dengan keputusan bersama oleh Qatar dan Indonesia dikarenakan oleh solidaritas pada masyarakat Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Pembatalan ini berdampak pada beberapa hal teknis dan administratif yang sebetulnya telah disiapkan sejak jauh-jauh hari.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Melakukan koordinasi dengan pihak Qatar Museums, KBRI Doha, dan Kedutaan Besar Qatar di Jakarta untuk tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-festival dan non-selebrasi di Qatar pada bulan November dan Desember.

## **B . SK 2.0 Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola**

- IKK 2.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

#### **Progress / Kegiatan :**

- pembuatan SP2B FBK Stimulan sebanyak 27 SP2B yg sdh di nyatakan LULUS tahap akhir karena sudah galang dana Publik 25 jt

- Melakukan Zoom Meeting Pelaporan dan perpajakan FBK Stimulan oleh Bendahara Setditejnbud dengan Penerima Dana FBK Stimulan Setiap Sebelum pemberian SP2B ke penerima dana FBK Stimulan 2023.

#### **Kendala / Permasalahan :**

- Banyak linimasa FBK Stimulan yg kegiatannya terlalu mepet kegiatannya sebelum pencairan SP2B

- masih Kurang pemahannya Para Penerima dana FBK Stimulan tentang Perpajakan.

#### **Strategi / Tindak Lanjut :**

Menghimbau kepada Para Pengusul Untuk memahami tahapan-tahapan mengenai Pencairan bantuan pemerintah khususnya FBK Stimulan agar tidak ada revisi linimasa yg bisa menghambat kegiatan yg mereka usulkan.

## **C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.1 Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

#### **Progress / Kegiatan :**

- melakukan rapat evaluasi triwulan III dan IV terhadap target perjanjian kinerja Tahun 2023

- melakukan pengukuran kinerja Triwulan III dan IV

- pendampingan penginputan pengukuran kinerja kepada seluruh satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan

- menyusun revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- pendampingan dan koordinasi dalam penyusunan revisi Perjanjian Kinerja satuan kerja Tahun 2023 di lingkungan Ditjen Kebudayaan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Kendala / Permasalahan :**

Terdapat beberapa kendala pada aplikasi SPASIKITA seperti menu input capaian IKK yang tidak muncul, tidak bisa mengisi rekomendasi pimpinan, perbedaan jumlah pagu anggaran, dll

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi Biro Perencanaan terkait kendala teknis yang ada.

**D . SK 3.0 Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan**

- IKK 3.2 Jumlah Satker di Ditjen Kebudayaan yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

**Progress / Kegiatan :**

Adanya temuan Inspektorat Jenderal bahwa Balai Pelestarian Kebudayaan harus membuat Proses Bisnis berdasarkan Permendikbudristek Nomor 33 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan pada pasal 13 huruf a.

**Kendala / Permasalahan :**

Belum tersusunnya Peta Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan.

**Strategi / Tindak Lanjut :**

Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan

**3. REKOMENDASI PIMPINAN**

1. Penyelesaian pelaporan kegiatan dan keuangan berbasis akuntabilitas kinerja program yang SMART 2. Optimalisasi kinerja sumber daya manusia Sekretariat Ditjen Kebudayaan dalam rangka penyelesaian pelaporan kegiatan dan keuangan 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Ditjen Kebudayaan 4. Membangun kerangka kerja logis sebagai salah satu alat atau pemandu dalam perencanaan sistematis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari program Sekretariat Ditjen Kebudayaan 5. Meningkatkan dan meluaskan peran dan keterlibatan SDM Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan ekosistem pemajuan kebudayaan dalam giat-giat kebudayaan

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 16 Januari 2024

**Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan**



**Fitra Arda**